



# Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)



**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN  
KOTA BALIKPAPAN**

**TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Kota Balikpapan selama tahun anggaran 2023 dalam melaksanakan tujuan dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

**"Meningkatkan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan"**

Upaya pencapaian tujuan tersebut didukung melalui pelaksanaan sasaran **"Meningkatnya Infrastruktur Yang Terpadu Dan Berkualitas"** dengan Indikator sasaran yang menjadi tanggung jawab pada Dinas Perumahan dan Permukiman adalah indikator **" Presentase Permukiman Layak Huni"**

Hal ditunjukkan kepada masyarakat bahwa Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Kota Balikpapan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja Perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes serta memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi pada urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Mudah-mudahan, penyajian LKjIP Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Kota Balikpapan Tahun 2023 dapat menjadi bahan untuk mengevaluasi kinerja selama satu tahun, identifikasi, pembelajaran dan masukan strategis bagi seluruh pemangku kepentingan serta sebagai umpan balik bagi seluruh jajaran aparatur di Lingkungan Dinas Perumahan dan

Permukiman Kota Balikpapan Kota Balikpapan serta meningkatkan pola kinerja dengan konsep perbaikan secara berkelanjutan (*continously improvement*) dan berjalan lebih efektif dan efisien.

Balikpapan, 28 Februari 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN  
PERMUKIMAN  
KOTA BALIKPAPAN



RAFIUDDIN, ST., MT

## IKHTISAR EKSKUTIF

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2023 yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di urusan bidang Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan, selalu berkomitmen kuat untuk melakukan kinerja dengan baik berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari amanah yang diemban tersebut, maka disusun Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2023 Tahun 2023 yang menyajikan berbagai keberhasilan/capaian strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan serta sejumlah permasalahan dan sejumlah hal yang perlu perbaikan. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Pada Tahun 2023 Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang diimplementasikan dengan 4 (empat) Sasaran Strategis yang dicapai melalui sejumlah program, kegiatan dan sub kegiatan sepanjang tahun 2023. Untuk mengukur sejauh mana capaian sasaran tersebut, ditetapkan 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2023.

Adapun secara umum simpulan keberhasilan capaian kinerja tujuan dan 4 (empat) sasaran strategis yang diukur dengan 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 sebagai berikut:

- a. **Tujuan " Meningkatkan Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas**, dengan indikator "**Persentase Permukiman Layak Huni**, terdapat realisasi sebesar 99,11% dari target 99,32% atau capaian sebesar 99,79% dengan **kriteria" Sangat Tinggi"**.
- b. **Sasaran I " Meningkatkan cakupan rumah layak huni"**, dengan Indikator "**Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni"**, dengan realisasi

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>i</b>
<b>Ikhtisar Eksekutif</b> .....	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan tujuan.....	4
1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah.....	5
1.5 Sistematika Penyajian .....	27
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>28</b>
2.1 Rencana Strategis.....	28
2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 .....	31
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	32
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>44</b>
3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya.....	44
3.2 Capaian Kinerja Organisasi.....	36
3.3 Realisasi Keuangan Tahun 2023.....	120
3.4 Inovasi dan Penghargaan .....	126
<b>IV PENUTUP</b>	<b>127</b>
4.1 Penutup.....	127

- sebesar **99,83** dari target **99,83** sehingga capaian sebesar **100%** dengan **kriteria "Sangat Tinggi"**.
- c. Sasaran II " Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai" dengan Indikator "Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU",** terdapat realisasi sebesar **12,18%** dari target **14,5%** atau capaian sebesar **84%** dengan **kriteria " Tinggi"**.
  - d. Sasaran III" Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh" dengan Indikator "Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh,** terdapat realisasi sebesar **36.80%** dari target **51,47%** atau capaian sebesar **71,49%** dengan **kriteria " Tinggi"**.
  - e. Sasaran IV "Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah",** dengan realisasi sebesar **72,55** dari target **75** sehingga capaian sebesar **96,75%**, dengan **kriteria "Sangat Tinggi"**.

Berbagai pencapaian target sasaran-sasaran kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan memberikan gambaran bahwa keberhasilan dan kegagalan kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Kota Balikpapan. Keberhasilan sangat ditentukan oleh komitmen, kerjasama, keterlibatan dan dukungan aktif segenap aparatur di semua bidang, selain itu kerjasama dengan instansi terkait sangat diperlukan dalam mendukung program kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan. Oleh karena itu pada capaian kinerja yang tidak tercapai, akan dievaluasi dan dianalisa penyebab dan tindak lanjutnya serta mengidentifikasi risiko dan dilakukan penilaian risiko untuk mendapatkan tindak pengendalian.

# **BAB I**

## **P E N D A H U L U A N**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, bahwa salah satu fungsi pokok Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan adalah melaksanakan fungsi perumusan kebijakan teknis di urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan mempunyai mandat yang bersifat strategis yaitu:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota;
2. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
3. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan.
4. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG);
5. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
6. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 ha.;
7. Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota;
8. Penyelenggaraan PSU Perumahan;
9. Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Balikpapan. Adapun Rumusan tujuan sasaran RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Kota Balikpapan adalah:

**TUJUAN 3: Meningkatkan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan**

Upaya pencapaian tujuan ini didukung melalui pelaksanaan sasaran **“Meningkatnya Infrastruktur Yang Terpadu Dan Berkualitas”** dengan Indikator sasaran yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan dan Permukiman adalah

**Indikator**  **“Presentase Permukiman Layak huni”**

Berdasarkan Perencanaan dalam RPJMD Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 tersebut diatas, maka keterkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman dapat dipetakan sebagai berikut :

**Tabel 4.1**

**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Dinas Perumahan dan Permukiman dengan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026**

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
<b>Misi Ke - 3 :</b> <b>Menyediakan Infrastruktur Kota yang Memadai</b>	<b>Tujuan 1 :</b> <b>Meningkatkan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan</b>	<b>Indikator Tujuan 1 :</b> <b>Indeks Kepuasan Layanan Insfrastuktur</b>	<b>Sasaran 3.1:</b> <b>Meningkatnya Infrastruktur Yang Terpadu Dan Berkualitas</b>	<b>Indikator sasaran 3.2:</b> <b>Presentase Permukiman Layak huni</b>



Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan menetapkan strategi-strategi dalam melaksanakan fungsi urusan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Sebagai wujud pertanggungjawaban dan informasi publik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dalam penyelenggaraan manajemen SDM aparatur di Pemerintah Kota Balikpapan tersebut maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2023. Laporan kinerja ini merupakan tahun kesatu pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan diukur berdasarkan penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2023.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;

6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
7. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
8. Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Nomor: 900/132/Disperkim Tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Penyusunan laporan kinerja ini bermaksud sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dalam pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun di tahun 2023 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk memberikan informasi keberhasilan dan kegagalan kinerja serta sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan di masa yang akan datang.

## **1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah**

### **1.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022, maka Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman adalah sebagai berikut:

#### **A. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan, permukiman, pertamanan dan permakaman;
- b. penyusunan rancangan kebijakan pencegahan timbulnya permukiman kumuh;
- c. penyusunan rancangan kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh;
- d. pengoordinasian penataan prasarana, sarana dan utilitas dipermukiman khususnya di kawasan pembangunan perumahan;
- e. pengembangan dan penyebaran sistem informasi dan komunikasi perumahan dan permukiman;
- f. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan, permukiman, pertamanan dan permakaman;

- g. perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengendalian teknis dan pembinaan di bidang perumahan dan permukiman yang meliputi pembiayaan, pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan;
- h. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi penyelenggaraan urusan perumahan dan permukiman;
- i. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengendalian pemberian layanan konsultasi dan rekomendasi bidang perumahan dan permukiman;
- j. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
- k. pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- l. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
- m. pelaksanaan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
- n. penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas perumahan;
- o. pelaksanaan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung;
- p. pembinaan sertifikasi dan registrasi kepada orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas;
- q. pembinaan dan pengendalian UPTD;
- r. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **A. SEKRETARIAT**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian:

- a. penyusunan program;
- b. pengelolaan urusan keuangan;
- c. kepegawaian;
- d. rumah tangga kantor;
- e. perlengkapan;
- f. protokol;

- g. hubungan masyarakat;
- h. layanan informasi dan pengaduan;
- i. pembinaan pelayanan publik;
- j. kearsipan;
- k. surat menyurat; dan
- l. evaluasi dan pelaporan.

Sekretariat melaksanakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
- b. pengoordinasian penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah;
- c. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
- f. pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
- g. pengelolaan anggaran dinas dan penerimaan Dinas;
- h. pelaksanaan administrasi keuangan;
- i. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- j. pembinaan dan fasilitasi penyusunan standar pelayanan publik;
- k. pengelolaan survei kepuasan masyarakat;
- l. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- m. pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksana;
- n. pengoordinasian pengelolaan, pengembangan sistem teknologi informasi;
- o. pengoordinasian bidang dan UPTD;
- p. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat terdiri atas:

1. Subbagian Umum, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- c. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- e. menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- g. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- h. melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah;
- i. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- j. menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
- k. menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- l. menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- m. mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- n. memfasilitasi penyusunan standar operasional prosedur dan standar pelayanan;
- o. mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
- p. menyusun tatalaksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
- q. memfasilitasi pembinaan tatakelola pelayanan publik;
- r. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Program dan Keuangan, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi:
  - 1) rencana strategis;
  - 2) rencana kerja;
  - 3) rencana kerja tahunan;
  - 4) penetapan kinerja; dan
  - 5) laporan kinerja;
- b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
- c. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- d. melaksanakan supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- e. mengoordinasikan pembangunan, pengembangan pemeliharaan aplikasi dengan bidang;
- f. melaksanakan pengamanan *hardware* maupun *software* terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas bidang;
- g. melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- i. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
- j. mengoordinir penyusunan rencana kerja anggaran /dokumen pelaksanaan anggaran;
- k. melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
- l. melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan retribusi;
- m. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- n. mengoordinir dan meneliti anggaran;
- o. menyusun laporan keuangan Dinas;
- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **B. BIDANG PERUMAHAN**

Bidang Perumahan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Perumahan.

Bidang Perumahan melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan program dan kegiatan di Bidang Perumahan;
- b. pelaksanaan pendataan, pengawasan dan pengendalian penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Daerah;
- c. pelaksanaan sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Daerah;
- d. pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Daerah;
- e. pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program Daerah;
- f. penyusunan dan pengumpulan data bahan evaluasi dan pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan atau rumah khusus;
- g. pelaksanaan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan rumah susun umum atau rumah khusus;
- h. pelaksanaan proses rekomendasi rencana tapak pembangunan dan pengembangan perumahan;
- i. penyediaan data, informasi dan kajian mengenai penerbitan izin pembangunan dan pengembangan rumah;
- j. pengoordinasian layanan izin pembangunan dan pengembangan perumahan
- k. melaksanakan persiapan teknis untuk bahan penerbitan sertifikat hak milik satuan rumah susun dan pelaksanaan proses penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung;
- l. pelaksanaan pembinaan sertifikasi dan registrasi kepada orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah tingkat kemampuan kecil;
- m. pelaksanaan fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik;



- n. perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum;
- o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **C. BIDANG PERMUKIMAN**

Bidang Permukiman mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Permukiman.

Bidang Permukiman melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan program kerja di Bidang Permukiman;
- b. pelaksanaan perencanaan, bimbingan dan bantuan teknis penataan kawasan kumuh dan rawan bencana di permukiman;
- c. pelaksanaan survei dan penelitian penataan kawasan kumuh dan rawan bencana di permukiman;
- d. pelaksanaan evaluasi, pengkajian dan pengarahannya penataan permukiman kumuh dan rawan bencana di permukiman;
- e. pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
- f. penyusunan dan penyiapan data bahan evaluasi dan pengembangan penataan permukiman kumuh dan rawan bencana di Permukiman;
- g. pengaturan penataan bangunan di kawasan kumuh dan rawan bencana, sarana prasarana dan fasilitas lingkungan;
- h. penyusunan data dan informasi kebijakan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- i. pelaksanaan survei lapangan dalam rangka analisis kesesuaian pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
- j. penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan permukiman;
- k. melaksanakan pengawasan dan pengendalian kawasan permukiman untuk menjamin pencegahan permukiman kumuh dan pembangunan permukiman yang layak huni, sehat, aman, serasi dan teratur;

- l. pengoordinasian layanan administrasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **D. BIDANG PERTAMANAN DAN PERMAKAMAN**

Bidang Pertamanan dan Permakaman mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan di Bidang Pertamanan dan Permakaman.

Bidang Pertamanan dan Permakaman mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan program kerja di Bidang Pertamanan dan Permakaman;
- b. penyusunan pedoman operasional perencanaan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan, penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan, penyediaan prasarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian, dan kerja sama penyediaan/pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman;
- c. penyelenggaraan pengelolaan dan pengendalian prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian;
- d. pengkoordinasian dan sinkronisasi penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
- e. pelaksanaan kerja sama penyediaan/pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman.
- f. pelaksanaan verifikasi dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman dari pengembang;
- g. pelaksanaan fasilitasi penyediaan tenaga listrik untuk masyarakat;
- h. pelaksanaan fasilitasi pembentukan tim verifikasi penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum;

- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**E. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022 terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  - 1. Subbagian Umum; dan
  - 2. Subbagian Program dan Keuangan;
- c. Bidang Perumahan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Permukiman, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pertamanan dan Permakaman, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. UPTD.

Gambar 2.1

**Bagan Struktur Organisasi**

1. SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN



### 1.4.2 Potensi Sumber Daya Manusia Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan

Keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tidak terlepas dari peran aktif dari SDM Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Kota Balikpapan yang saling berkoordinasi dan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan untuk secara bersama-sama mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Adapun dukungan SDM aparatur Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan berdasarkan keadaan Desember 2023 sebanyak 43 orang, dengan klasifikasi berdasarkan pangkat, golongan, jenjang pendidikan, eselon dan gender sebagaimana dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.1**

**Jumlah PNS Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Berdasarkan Pangkat Tahun 2023**

NO	Keterangan	PANGKAT/ GOL RUANG									PRIA	WANITA
		IV.b	IV.a	III.d	III.c	III.b	III.a	II.d	II.c	II.a		
1	Pembina Tingkat I / (IV/b)	1									1	
2	Pembina Tingkat I / (IV/b)	1									1	
3	Pembina / (IV/a)		1								1	
4	Penata Tingkat I (III/d)			1							1	
5	Penata Tingkat I / (III/d)			1							1	
6	Penata Tingkat I / (III/d)			1								1
7	Penata / (III/c)				1							1
8	Penata Tingkat I / (III/d)			1								1
9	Penata Tingkat I / (III/d)			1								1

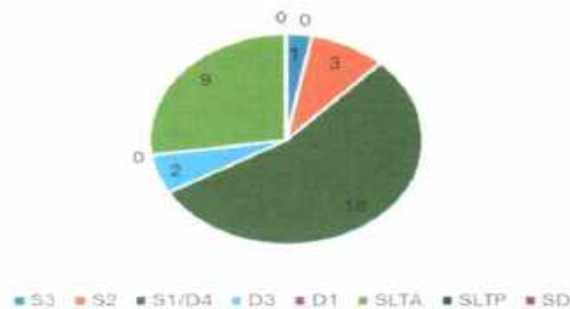
NO	Keterangan	PANGKAT/ GOL RUANG									PRIA	WANITA
		IV.b	IV.a	III.d	III.c	III.b	III.a	II.d	II.c	II.a		
10	Penata Tingkat I / (III/d)			1							1	
11	Penata / (III/c)				1						1	
12	Pembina / (IV/a)		1									1
13	Penata Tingkat I / (III/d)			1								1
14	Penata Tingkat I / (III/d)			1								1
15	Penata Muda Tingkat I / (III/b)					1						1
16	Penata Muda / (III/a)						1					1
17	Penata Muda / (III/a)						1					1
18	Penata Muda / (III/a)						1					1
19	Penata Muda / (III/a)						1				1	
20	Penata Muda / (III/a)						1				1	
21	Penata Muda / (III/a)						1				1	
22	Penata Muda / (III/a)						1				1	
23	Penata Muda / (III/a)						1				1	
24	Penata Muda / (III/a)						1					1
25	Pengatur Tingkat I / (II/d)							1			1	
26	Pengatur Tingkat I / (II/d)							1				1
27	Pengatur / (II/c)								1		1	
28	Pengatur Muda / (II/a)									1	1	
29	Pengatur / (II/c)								1		1	
30	IX										1	
31	IX										1	
32	IX										1	
33	IX										1	
	<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>13</b>

Sumber: Bagian Umum

Dari tabel 1.2. diketahui bahwa tahun 2023 jumlah pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan berdasarkan **Golongan** menunjukkan bahwa jumlah tertinggi pegawai golongan III sebanyak 20 orang.

Gambar 1.1

Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023



Dari Gambar 1.2 diketahui bahwa tahun 2023 jumlah pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan berdasarkan **Tingkat Pendidikan** menunjukkan bahwa jumlah tertinggi pegawai dengan Pendidikan S1 sebanyak 18 orang.

#### 1.4.3 Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.

Sarana dan prasarana merupakan segala sesuatu yang digunakan, dipakai, ditempati dalam hubungan langsung dengan pelayanan kepegawaian yang diberikan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan, baik itu perlengkapan, peralatan, kendaraan operasional pelayanan, jaringan komunikasi, tempat duduk tamu, dan sarana pendukung pelayanan lainnya harus memadai dan sesuai standar pelayanan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan kepegawaian.

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dalam penyelenggaraan pelayanan publik bidang kepegawaian dapat dijelaskan sebagaimana terlampir.

Adapun Laporan Persediaan dan Aset Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan per 31 Desember 2023 Adalah Sebagai Berikut:

- a. Berdasarkan Berita Acara Inventarisasi Persediaan (Stock Opname) Nomor :  
036 /01072 / BA – INVENTARISASI-PERSEDIAAN /DISPERKIM  
Jumlah barang persediaan per tanggal 31 Desember 2023 adalah :

I. Sekretariat

- Alat Tulis Kantor	886,800
- Kertas dan Amplop	1,355,000
- Tinta dan Cartridge	2,129,000
- Alat Listrik dan Penerangan	-
- Barang Cetak	1,510,000
- Cetak Amplop	288,000
- Peralatan dan Bahan Pembersih	1,178,000
	7,346,800

II. Permukiman

- Alat Tulis Kantor	0
- Kertas dan Cover	0
- Bahan Komputer	0

IV. Pertamanan dan Permakaman (PSU)

- Alat Tulis Kantor	0
- Kertas dan Cover	0
- Alat dan Bahan Komputer	0

IV.  
Perumahan

- Alat Tulis Kantor	0
- Kertas dan Cover	0
- Alat dan Bahan Komputer	0

### 1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Sesuai tugas dan fungsinya secara garis besar jenis pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan, antara lain:

**Tabel 1.2**  
**ISU-ISU DAN INOVASI BIDANG PERMUKIMAN**  
**TAHUN 2025**

No	Isu	Dasar Hukum	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	INOVASI	KETERANGAN
1	Masih terdapat rumah tidak layak huni	Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	Masih terdapat Rumah Masyarakat yang Tidak Layak Huni di Kota Balikpapan	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni melalui Program Kawasan Permukiman dan Program Perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Sistem informasi penyediaan data RTLH Terintegrasi melalui Master Data Perumahan dan Kawasan Permukiman	Menyediakan data atau informasi terkait Rumah Tidak Layak Huni yang dapat diakses oleh masyarakat juga terdapat data /informasi terkait pembangunan yang akan, sedang dan sudah dilakukan perbaikan/Peningkatan Kualitas
2	Masih terdapat kawasan permukiman yang termasuk dalam kategori Kumuh dan Resiko Kumuh baru	SK Wali Kota Balikpapan tentang Hasil Peninjauan Ulang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Kota Balikpapan Tahun 2023	Masih terdapat kawasan Kumuh	Melakukan Penanganan/Pemugaran Permukiman Kumuh dan melakukan tindakan pencegahan untuk Resiko munculnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Baru	Penanganan dan Pencegahan Kumuh secara Kolaboratif melibatkan semua stakeholder dan pihak terkait	Kolaborasi dan Kerjasama dengan semua pihak terkait untuk terselenggaranya Penanganan Kumuh secara terpadu



No	Isu	Dasar Hukum	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	INOVASI	KETERANGAN
3	Dampak dari perpindahan IKN	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN)	Potensi munculnya Kawasan kumuh Baru	Pencegahan untuk menghindari munculnya Kawasan Kumuh baru akibat pertambahan penduduk	Melibatkan Masyarakat secara langsung dan pendampingan oleh Tenaga Pendamping dalam meningkatkan kesadaran publik	Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Lembaga Keswadayaan Masyarakat
4	Pentingnya update data secara digital Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) terutama data RTLH pada kawasan Kumuh dan diluar Kumuh	PP No. 12/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Belum tersedianya data lengkap rumah tidak layak huni yang terverifikasi dan update periodik secara digital	Pelaksanaan <i>updating</i> data secara digital	Penggunaan Aplikasi Satu Data Dinas Perumahan dan Permukiman	Pengumpulan data atau informasi secara akurat dan tepat sasaran terkait perumahan dan permukiman kumuh yang dapat diakses oleh masyarakat juga terdapat data /informasi terkait pembangunan yang akan, sedang dan sudah dilakukan perbaikan/Peningkatan Kualitas yang dilakukan secara akuntabilitas/transparan

#### ISU-ISU BIDANG PERUMAHAN

TAHUN 2025

No	Isu	Dasar Hukum	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	INOVASI	KETERANGAN
1	Pentingnya update data perumahan,	PP No. 12/2021 tentang Perubahan atas	Belum tersedianya data	Pelaksanaan <i>updating</i> data secara periodik	- Menyiapkan instrumen pendataan	

No	Isu	Dasar Hukum	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	INOVASI	KETERANGAN
	data rumah pada kawasan rawan bencana;	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	perumahan dan data rumah di kawasan rawan bencana yang ter-update secara periodic		secara detail dan digital agar dapat menjangkau data yang lebih akurat - Meningkatkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat untuk menghindari resistensi dari masyarakat yang enggan berpartisipasi dalam pendataan rumah di kawasan rawan bencana - Meningkatkan koordinasi antar OPD terkait dalam hal penyiapan data dukung/data sekunder	
2	Perencanaan dan pengembangan perumahan yang belum optimal	PP No. 12/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	belum sesuai perencanaan perumahan dengan data topografi/kontur kawasan perumahan dan data kepemilikan lahan, adanya alih fungsi pemanfaatan lahan non komersial di dalam kawasan perumahan, rendahnya pelaksanaan pengawasan pengembangan perumahan	Bersinergi antar OPD terkait dan internal DISPERKIM dalam hal perizinan dan pengawasan pengembangan perumahan	- Meningkatkan koordinasi antar OPD dalam hal pemberian rekomendasi dan perizinan bagi pengembang - Memaksimalkan pemanfaatan aplikasi One Map One Data dari DPPR dalam hal akses data sistem drainase dan sistem jaringan jalan - Meningkatkan kapasitas SDM DISPERKIM melalui pelatihan dan pemberian dukungan fasilitas dalam pelaksanaan	

No	Isu	Dasar Hukum	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	INOVASI	KETERANGAN
					<p>pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyiapkan instrumen pengawasan secara detail dan digital agar dapat memberikan informasi pengawasan yang lebih informatif dan kredibel</li> <li>- Melibatkan pemerintah setempat (Kelurahan, Kecamatan dan RT) dalam memberikan informasi terkait pengembangan perumahan</li> </ul>	
3	Perizinan dan pemenuhan standar keandalan bangunan serta memastikan penyediaan perumahan yang serasi dengan tata ruang dan dilayani ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>- PP No. 12/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>- PERMENSOS No. 6/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana</li> </ul>	Belum optimalnya penyediaan rumah yang memenuhi standar rumah layak huni serta fasilitas PSU dalam kawasan perumahan dan permukiman yang belum memadai	Peningkatan penyediaan perumahan yang sesuai dengan tata ruang dan terpadu dengan layanan infrastruktur dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan koordinasi antar OPD dalam hal pemberian rekomendasi dan perizinan bagi pengembang</li> <li>- Melakukan koordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan, baik secara vertikal maupun horizontal, baik dalam hal perencanaan, pembangunan maupun pengawasan</li> </ul>	

No	Isu	Dasar Hukum	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	INOVASI	KETERANGAN
		Prasarana Lingkungan				
4	Pengembangan sistem perumahan publik berbasis rumah susun/vertikal di masih di tempat yang jauh dari perkotaan;	- Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (mengubah UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun) - PP No.13/2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun	Adanya peningkatan kepadatan penduduk dan keterbatasan lahan pemukiman	Pengembangan sistem perumahan publik berbasis rumah susun di perkotaan;	- Meningkatkan koordinasi antar OPD dalam hal penyiapan lahan/land banking untuk pembangunan RUSUNAMI atau RUSUNAWA bagi masyarakat berpenghasilan rendah - Melakukan koordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan, baik secara vertikal maupun horizontal, baik dalam hal perencanaan maupun pengawasan dalam pemberian manfaat kepada masyarakat	
5	Masih adanya masyarakat yang membeli rumah tidak berizin	PP No. 12/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kurangnya informasi kepada masyarakat terkait data perumahan yang berizin	Sistem informasi penyediaan data secara elektronik melalui Master Data Perumahan Berizin di Kota Balikpapan	melaksanakan publikasi informasi yang mudah diakses oleh masyarakat dan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat	
6	Belum optimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat	- PERMENDAGRI No. 59/2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal - PERMEN PUPR No. 13/2023 tentang	- Belum tersedianya Juknis Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Kota Balikpapan - Belum	- Saat ini telah ada draft Nasmik dan Juknis Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Kota Balikpapan - Meningkatkan edukasi kepada perangkat pemerintah setempat dan masyarakat baik	- Melakukan koordinasi ke Bagian Hukum dalam percepatan pengesahan dokumen Juknis Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang	

No	Isu	Dasar Hukum	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	INOVASI	KETERANGAN
		Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat	optimalnya informasi kepada perangkat pemerintah setempat dan masyarakat terkait adanya layanan SPM Bidang Perumahan Rakyat	secara langsung melalui sosialisasi maupun melalui website	Perumahan Rakyat di Kota Balikpapan - Penyediaan sistem Informasi berbasis Website yang sistematis untuk membantu masyarakat guna pelayanan seperti Informasi Rumah terdampak Bencana dan Rumah Sewa di Kota Balikpapan sehingga akses Informasi lebih mudah dan informatif.	
7	Belum tersedianya wadah untuk melindungi hak dan kewajiban penghuni RUSUNAMI	PERMEN PUPR Nomor 23/PRT/M/2018 Tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun	Belum terbentuknya Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) di RUSUNAMI	Meningkatkan koordinasi dan memberi layanan konsultasi/pendampingan bagi masyarakat dan pengembang RUSUNAMI dalam pembentukan P3SRS	melaksanakan sosialisasi secara langsung dan melalui media sosial terkait pentingnya dan manfaat dari terbentuknya P3SRS bagi pemilik/penghuni RUSUNAMI	
8	Peningkatan Sarana dan Prasarana Rusunawa	- PP No.13/2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun	Kurangnya SDM di UPTD Rusunawa	Terpenuhinya SDM di UPTD Rusunawa sehingga bisa berjalan secara optimal	- Penyediaan SDM untuk pekerjaan operasional dan perawatan hunian RUSUNAWA melalui <i>Outsourcing</i>	
8	Peningkatan pelayanan penghunian rusunawa	- PP No.13/2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun	Belum terintegrasinya data <i>realtime</i> jumlah penghunian yang dapat diakses oleh masyarakat umum	Pengintegrasian layanan secara elektronik/digital	Pengembangan fitur aplikasi SIM-PKP dalam hal layanan penghunian rusunawa Kota Balikpapan	

**ISU-ISU DAN INOVASI BIDANG PSU  
TAHUN 2025**

No	Isu	Dasar Hukum	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	INOVASI	KETERANGAN
1	Belum semua prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan yang ada di Balikpapan diserahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan	Perda Nomor 5/2013	Pengembang belum mengajukan permohonan penyerahan PSU	Peningkatan Sosialisasi Kewajiban Penyerahan PSU oleh Pengembang	Pemanfaatan Teknologi Digital   Penyediaan Layanan Teknis Penyiapan Persyaratan   Pemberian Insentif & Disinsentif	
2	Keterbatasan Ketersediaan Layanan Penyerahan PSU	Perda Nomor 5/2013	Ketersediaan SDM terbatas	Penambahan layanan dengan tenaga outsourcing	Pemanfaatan Tenaga Profesional Teknis   Pemanfaatan Peralatan berbasis Teknologi Tinggi	
3	Kurangnya kualitas informatif data PSU Perumahan	Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011	Kemampuan kelola data statistik yang rendah	Peningkatan Informatif Data Sektor PSU Perumahan	Peningkatan dan Penambahan Informasi berbasis Statistik/Informasi Digital	
4	Potensi Ketidakesesuaian pemanfaatan PSU Perumahan	Perda Nomor 5/2013	Belum intensifnya pelaksanaan monitoring pemanfaatan PSU	Peningkatan Kerjasama dengan pihak ketiga dalam monitoring kawasan perumahan	Pembinaan agen agen pengawasan di tengah masyarakat	Agan Pengawasan ini akan memberi informasi terkait status PSU diperumahan
6	Masih terdapat kawasan perumahan yang belum terlayani PSU yang memadai	Perda Nomor 5/2013	Tingkat penyerahan PSU rendah	Meningkatkan animo dan kesadaran penyerahn PSU	PSU Award	Pemberian Penghargaan Kepada Pengembang Terbik dalam Penyerahan PSU Perumahan

No	Isu	Dasar Hukum	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	INOVASI	KETERANGAN
7	Keterbatasan layanan perbaikan lampu PJU	Perda Nomor 5/2013	Ketidaksediaan Alat Kerja dan SDM	Penyediaan Alat Kerja dan SDM Teknis	Penyediaan Kendaraan lift Perbaikan Lampu dan Tenaga Teknis	Kendaraan yang memberi layanan pemeliharaan pada perbaikan Lampu Jalan
8	Proses Penyerahan PSU masih njelimet	Perwali 22/2014 ; Perwali 16/2018	Ada proses yang masih berpotensi bisa dipercepat dan dipangkas	Evaluasi Bisnis Proses, SOP dan Perwali	Tahapan proses yang lebih cepat dan terukur	
9	Kualitas dan Kuantitas Monitoring Pertumbuhan PSU Perumahan	Perda Nomor 5/2013	Data kurang update dan informatif	Pengembangan sistem monitoring efektif periodik	Sensus Rutin	

Lingkungan strategis merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan terdiri atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal.

Perlunya komitmen bersama untuk meningkatkan kekuatan internal Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ada dalam menjalankan fungsi pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman diantaranya sebagai berikut:

1. **Perlunya Konsistensi Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan** Untuk mewujudkan visi dan misi yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan sangat diperlukan adanya konsistensi kegiatan tahunan antara tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) dengan rencana kinerja yang diusulkan setiap tahunnya.
2. Peningkatan Koordinasi Internal dan Eksternal

Keterpaduan perencanaan dalam Rencana Strategis (RENSTRA),

baik keterpaduan program maupun sasaran, memerlukan kemantapan koordinasi dalam pelaksanaan, pemantauan, sinkronisasi dan evaluasi pada tataran operasionalnya, khususnya koordinasi antar bidang dan internal bidang. Oleh karenanya dengan semakin meningkatnya tuntutan peningkatan kinerja pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan manajemen aparatur, diperlukan pemantapan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi internal Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dan eksternal Perangkat Daerah serta stakeholder terkait yang berkelanjutan.

### 3. ***Peningkatan Profesionalitas ASN***

Peningkatan kualitas dan kapasitas Aparatur Sipil Negara Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan penting untuk dilaksanakan agar tetap mampu meningkatkan keterampilan, pengetahuan, keahlian dan perilaku yang terus berkembang sesuai dinamika perubahan sesuai tugas dan fungsi melalui pelatihan dan tugas belajar/izin belajar. Pengukuran profesionalitas ASN menggunakan Indeks Profesionalitas ASN.

### 4. ***Penguatan SPIP***

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP.

SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.



## 1.5 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Bab I** – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, data organisasi yang meliputi tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan, profil Badan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan serta sistematika penulisan.
- Bab II** – Perencanaan Kinerja, menjelaskan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja utama dalam rencana strategis periode tahun 2021-2026 dan perjanjian kerja tahun 2023
- Bab III** – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pengukuran capaian kinerja tahun 2023 dan analisis pencapaian kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan terhadap indikator kinerja utama (IKU) dikaitkan dengan pertanggungjawaban keuangan terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2022.
- Bab IV** – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan tahun 2023 ini dan menguraikan rekomendasi, dan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan data.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 RENCANA STRATEGI**

Rencana strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Walikota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 dan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Nomor: 900/132/Disperkim Tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.

Adapun Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

##### **a. Visi dan Misi**

Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih merupakan Visi dan Misi Perangkat Daerah. Adapun visi RPJMD Kota Balikpapan 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**“Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman  
Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam  
Bingkai Madinatul Iman”**

Misi Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 masih melanjutkan, memperkuat dan memantapkan misi Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan periode sebelumnya, yaitu:

1. Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik ;
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi;
3. Menyediakan infrastruktur kota yang memadai
4. Mewujudkan kota nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan;
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

Pada misi tersebut urusan bidang perumahan dan permukiman terkait dengan misi ke-3 yaitu **"Menyediakan Infrastruktur Kota yang Memadai"**. Badan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan berupaya melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta perencanaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang perumahan, permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum.

#### **b. Tujuan**

Adapun Tujuan Pemerintah Kota Balikpapan sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021 -2026 adalah Meningkatkan infrastruktur yang terpadu dan berkualitas.

Pembangunan dan peningkatan layanan infrastruktur secara merata merupakan faktor yang penting untuk mendorong konektivitas yang merupakan kunci perkembangan suatu wilayah dan menjadi salah satu faktor penting penentu pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Penyediaan layanan infrastruktur yang berkualitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, mempercepat gerak ekonomi, serta mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah.

Pengukuran keberhasilan dari tujuan tersebut adalah dengan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur. Indeks kepuasan layanan infrastruktur adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya untuk mencapai tujuan RPJMD Kota Balikpapan dijabarkan dengan sasaran meningkatnya infrastruktur yang memadai dan berkualitas dengan indikator indeks pembangunan infrastruktur dan persentase permukiman layak huni. Sasaran RPJMD ini menjadi Tujuan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan yaitu:

## Meningkatnya Infrastruktur Yang Memadai Dan Berkualitas

### c. Sasaran

Upaya pencapaian tujuan Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, didukung oleh beberapa sasaran, yaitu:

1. Meningkatkan cakupan rumah layak huni. Sasaran ini Mengukur persentase rumah layak huni yang disediakan, difasilitasi oleh kota Balikpapan melalui penyediaan rumah korban bencana, rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program maupun penyediaan rumah tidak layak huni terhadap jumlah rumah di Kota Balikpapan. Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase rumah layak huni.
2. Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai. Sasaran ini mengukur persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU. Sasaran ini diwakilkan oleh indikator Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU. Unit Rumah adalah jumlah unit rumah di dalam perumahan formal diukur dengan Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU dan diserahkan ke Pemerintah Daerah.
3. Berkurangnya luas kawasan kumuh. Sasaran ini mengukur persentase berkurangnya luas kawasan kumuh sesuai dengan SK Luas Kumuh Kota Balikpapan Tahun 2020 seluas 153, 3 Ha. Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh.
4. Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Disperkim. Sasaran ini memiliki indikator Nilai Reformasi Birokrasi Disperkim.

Adapun matrik Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

**Tabel 2.2.**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS	TARGET				
					TAHUN				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	Mengukur persentase rumah layak huni yang disediakan, difasilitasi oleh kota Balikpapan melalui penyediaan rumah korban bencana, rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program terhadap jumlah rumah di Kota Balikpapan	Jumlah Penyediaan Rumah Layak Huni ----- ---x100% Jumlah total Unit Rumah Kota	0.00 %	0.01%	0.02 %	0.03%	0.04%
2	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU	Mengukur persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU. Unit Rumah adalah jumlah unit rumah di dalam perumahan formal	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU ----- ---x100% Jumlah total unit rumah kota	16.7 5%	16.80 %	22.50 %	23.00%	23.50 %
3	Mengurangi luas kawasan kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	mengukur persentase berkurangnya luas kawasan kumuh sesuai dengan SK Luas Kumuh Kota Balikpapan Tahun 2020 seluas 153, 3 Ha.	Jumlah Kawasan Kumuh Kota ----- ---x100% Jumlah Luasan Kumuh sesuai SK Kumuh Walikota BPN	32.5 6%	51.47 %	67.78 %	84.08%	100.00 %
4	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Disperkim	Nilai Reformasi Birokrasi Disperkim	Nilai Reformasi Birokrasi Disperkim	Nilai Reformasi Birokrasi Disperkim	27.0 0	28,75	32,25	32,25	34.00

**2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023**

Pada tahun 2023 terdapat perubahan rumusan perhitungan indikator sasaran berdasarkan Berita Acara Hasil Koordinasi dan Asistensi Hasil Perubahan Perbaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan yang di tandatangani pihak Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dan Inspektorat Kota

Balikpapan, yaitu terdapat terdapat perubahan definisi operasional, rumus hitung dan target kinerja di tahun 2023-2026 berdasarkan:

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.7/8697/OTDA Perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Surat Edaran Sekretaris Dearah Nomor 060.4/01799/Org Tanggal 22 Desember 2023 Perihal Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023;
3. Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/505/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023

Adapun Perubahan Indikator Utama (IKU) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

1. Pada IKU "Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni awal target Jumlah Penyediaan Rumah Layak Huni", pada IKU awal hanya menghitung penyediaan rumah korban bencana, rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program terhadap jumlah rumah menjadi jumlah Unit Rumah Layak Huni adalah Jumlah unit rumah yang memenuhi persyaratan antara lain keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni, dapat mengacu pada data e-RTLH.
2. Pada IKU " Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU" , bahawa terdapat perubahan Definisi Operasional, Rumus hitung dan Target Kinerja di Tahun 2023-2026 karena pada IKU awal target pembanding adalah Jumlah total unit rumah kota baik swadaya maupun formal di Kota Balikpapan sehingga menjadi jumlah unit

rumah di dalam perumahan formal (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).

3. Pada IKU "Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh", Terdapat perubahan kalimat pada Sasaran, Indikator, Rumus hitung dan target di Tahun 2023-2026 karena pada IKU awal target perbandingan adalah Jumlah Kawasan Kumuh Kota terhadap Jumlah Luasan Kumuh sesuai SK Kumuh Walikota BPN menjadi Jumlah Kawasan Kumuh Kota Yang ditangani terhadap (Jumlah Luasan Kumuh sesuai SK Kumuh Walikota BPN sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).
4. Pada IKU "Nilai SAKIP Disperkim", terdapat perubahan sasaran, indikator sasaran yang sebelumnya adalah nilai Reformasi birokrasi menjadi nilai SAKIP Disperkim. Hal ini sesuai dengan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/505/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, bahwa karena nilai reformasi birokrasi sudah tidak dilakukan perhitungan kembali berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024.

Adapun sasaran, indikator sasaran, formulasi rumus hitung dan target pada Perubahan Indikator Utama (IKU) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3.**

Sasaran, Indikator, Definisi Operasional Rumus dan Target  
Indikator Sasaran

No	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS	TARGET				
					TAHUN				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	Mengukur persentase rumah layak huni terhadap jumlah rumah di Kota Balikpapan. Jumlah Unit Rumah Layak Huni adalah Jumlah unit rumah yang memenuhi persyaratan antara lain keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni, dapat mengacu pada data e-RTLH.	$\frac{\text{Jumlah Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah total Unit Rumah Kota}} \times 100\%$	0.00%	99.83%	99.95%	100%	akan menggunakan Baseline baru di pendataan tahun 2024 karena rencana sudah tercapai di tahun 2025



No	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS	TARGET				
					TAHUN				
					2022	2023	2024	2025	2026
2	Meningkatnya Prasarana , Sarana dan Utilitas Umum yang memadai	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU	Mengukur persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU. Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU adalah jumlah keseluruhan unit rumah dalam perumahan yang sedang maupun sudah dibangun oleh pengembang/ developer yang terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah dibuktikan dengan berita acara serah terima PSU Unit Rumah adalah jumlah unit rumah di dalam perumahan formal	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU ----- x100% Jumlah total unit rumah kota	16.75%	12.18%	18.18%	28.26%	36.42%

No	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS	TARGET				
					TAHUN				
					2022	2023	2024	2025	2026
3	Berkurangnya luas kawasan kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	mengukur persentase berkurangnya luas kawasan kumuh sesuai dengan SK Luas Kumuh Kota Balikpapan Tahun 2020 seluas 153, 3 Ha.	$\frac{\text{Jumlah Kawasan Kumuh Kota Yang Ditangani}}{\text{Jumlah Luasan Kumuh sesuai SK Kumuh Walikota BPN}} \times 100\%$	32.56%	51.47%	67.78%	84.08%	100.00%

No	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS	TARGET				
					TAHUN				
					2022	2023	2024	2025	2026
4	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Disperkim yang di keluarkan oleh Inspektorat Kota Balikpapan	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Disperkim yang di keluarkan oleh Inspektorat Kota Balikpapan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	74.00	75.00	76.00	78.00	80.00

### 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa untuk eselon II sasaran yang digunakan menggambarkan outcome dan aoutput pada bidangnya serta menggunakan indikator kinerja utama eselon II dan indikator kinerja lainnya yang relevan, sehingga Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2023 disusun dengan berdasarkan pada Indikator Kinerja Sasaran (IKU) yang telah ditetapkan.

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan sasaran, indikator kinerja, target, program, dan anggaran adalah sebagai berikut:

**Tabel: 2.5**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebelum dilakukan perubahan**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023				
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN				
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	Persen	0,01
2	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai	Persentase unit rumah yang sedang terbagun terfasilitasi (PSU)	Persen	16,80
3	Mengurangi luas kawasan kumuh	Persentase terlokalisasi luas kawasan kumuh	Persen	51,47
4	Meningkatnya Kualitas Persepsi Reformasi Birokrasi Diperikan	Nilai Reformasi Birokrasi Diperikan	Nilai	29,75

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	9.296.692.015	APBD
2.	Program Pengembangan Perumahan	7.784.553.500	APBD
3.	Program Kawasan Permukiman	3.635.898.800	APBD
4.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	2.454.855.500	APBD
<b>JUMLAH</b>		23.171.999.815	

<p>WALIKOTA BALIKPAPAN</p>  <p>H. RAHMAD MAS'UD, S.E., M.E.</p>	<p>Balikkpapan, 02 Januari 2023</p> <p>KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN</p>  <p>ALFIANRYAH, S.T.</p>
--	---

**Tabel: 2.6**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2023 setelah dilakukan perubahan**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	Persen	99,83
2	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU	Persen	14,50
3	Berkurangnya luas kawasan kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	Persen	51,47
4	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip DISPERKUM	Nilai	75

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.958.758.868	APBD-P
2	Program Pengembangan Perumahan	7.904.553.500	APBD-P
3	Program Kawasan Permukiman	4.165.648.800	APBD-P
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	4.954.855.500	APBD-P
<b>JUMLAH</b>		<b>28.023.816.668</b>	

Balikpapan, 22 Desember 2023

WALIKOTA BALIKPAPAN

  
 H. RAHMAD MAS'UD, S.E., M.E.

PIK KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN

  
 RAFIUDDIN

Pada Tahun 2023 Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Kota Balikpapan melaksanakan 4 (empat) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan dengan pagu murni sebesar **Rp. 23.171.999.815 menjadi** melaksanakan 4 (empat) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) dengan pagu sebesar **Rp. 28.023.816.668,00** pada mekanisme perubahan.

Adapun pendanaan untuk program, kegiatan dan sub kegiatan per sasaran strategis disajikan pada tabel sebagaimana di bawah ini:

**Tabel 2.7**  
**Anggaran Belanja Tahun 2023 per Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2023	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Meningkatnya infrastruktur yang terpadu dan berkualitas	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	99,83%	Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	(14) Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
					Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	(15) Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
						(16) Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP
					Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	(17) Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
						(18) Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
						(19) Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2023	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
					Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	(20) Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun
						(21) Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
					Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	(22) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
						(23) Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum
					Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	(24) Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)
	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU	14,50%	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	(32) Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
						(33) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
						(34) Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2023	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
	Mengurangi luas kawasan kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	51,47%	Program Kawasan Permukiman	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	(25) Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh
						(26) Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
						(27) Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
					Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	(28) Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh
						(29) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
						(30) Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh
			(31) Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh			
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Disperkim yang di keluarkan oleh Inspektorat Kota Balikpapan	75	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	(2) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor



Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2023	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
						(3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
						(4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
						(5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	(6) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(7) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				(8) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
				(9) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	(10) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					(11) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					(12) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					(13) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya**

Adapun hasil evaluasi atas SAKIP Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Gambar 3.1**  
**Hasil LHE SAKIP Tahun 2022**



Nilai total 77.55 dengan predikat BB-(Sangat Baik), dengan rekomendasi dari Inspektorat adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan reuiu atas target indikator agar target kinerja lebih matang;
- b. Menyusun monitoring evaluasi rencana aksi degan mencantumkan target dan realisasi indikaror kinerja sasaran;
- c. Pohon kinerja yang dibuat agar dimanfaatkan dalam perencanaan kinerja instansi;
- d. Memanfaatkan teknologi oinformasi (aplikasi) dalam melakukan pengukuran capaian kinerja.
- e. Melakukan analisis dan evaluasi kinerja dengan target jangka menengah

Adapun tindak lanjut yang telah dilakukan adalah:

1. Melakukan reviu/perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan berkoordinasi dan persetujuan Tim Evaluator SAKIP dari Inspektorat Kota Balikpapan.
2. Menyusun monitoring evaluasi rencana aksi dengan mencantumkan target dan realisasi indikator kinerja sasaran per triwulan;
3. Menyusun sPohon kinerja sesuai dengan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2021-2025 berdasarkan Keomendagri 050 -5889 yang sebagai dasar penyusunan Renja, penyusunan RKA/DPA dan perjanjian kinerja.
4. Memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) REAKSI dalam melakukan pengukuran capaian kinerja Rencana Kerja (ReNJA)
5. Melakukan analisis dan evaluasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Laporan Evaluasi Rencana Kerja.

### 3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2023 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang terkait dengan sasaran strategis.

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

2. Angka maksimum capaian setiap IKU sebesar 100%
3. Sedangkan untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran *instrument standart* pengukuran ordinal dengan skala pengukuran kinerja sebagai berikut :

Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, maka skala penilaian pengukuran yang digunakan sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja progres Positif**

Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negatif, maka skala yang digunakan sebagai berikut:

<b>Skor</b>	<b>Rentang Capaian</b>	<b>Kategori Capaian</b>
<b>4</b>	90,01% ≤ 100%	Sangat Tinggi
<b>3</b>	75,01% ≤ 90%	Tinggi
<b>2</b>	65,01% ≤ 75 %	Sedang
<b>1</b>	50,01% ≤ 65 %	Rendah

**Tabel 3.2**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja progres negatif**

<b>Skor</b>	<b>Rentang Capaian</b>	<b>Kategori Capaian</b>
<b>1</b>	50,01% ≤ 65 %	Rendah
<b>2</b>	65,01% ≤ 75 %	Sedang
<b>3</b>	75,01% ≤ 90%	Tinggi
<b>4</b>	90,01% ≤ 100%	Sangat Tinggi

### **3.2.1 Pencapaian Kinerja Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Rincian pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2023 yang disusun berdasarkan Tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja utama, Indikator Kinerja Kunci (IKK), satuan, target, realisasi, dan capaian dapat diuraikan pada tabel 3.3 sebagai berikut:

a. **Realisasi Kinerja Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama**

**Tabel 3.3**  
**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas	Persentase Permukiman Layak Huni	Persen	99,32	99,11	99,79
1	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	Persen	99.83	99.83	100.00
2	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai.	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU	Persen	14.5	12.18	84
3	Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	Persen	51.47	36.80	71.49
4	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip DISPERKIM	Nilai	75	72.55	96.73

Pada table 3.3 diperoleh pengukuran capaian kinerja berdasarkan indikator tujuan dan indicator kinerja utama pada sasaran strategis dengan realisasi capaian sebagai berikut:

a. **Tujuan " Meningkatkan Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas,** dengan indikator **'Persentase Permukiman Layak Huni,** terdapat realisasi sebesar 99,11% dari target 99,32% atau capaian sebesar 99,79% dengan **kriteria" Sangat Tinggi"**.

b. **Sasaran I " Meningkatkan cakupan rumah layak huni",** dengan Indikator **"Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni",** dengan realisasi sebesar **99,83** dari target **99,83** sehingga capaian sebesar **100%** dengan **kriteria" Sangat Tinggi"**.

**Sasaran II " Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai" dengan Indikator "Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU",** terdapat realisasi sebesar **12,18%** dari target **14,5%** atau capaian sebesar **84%** dengan **kriteria " Tinggi"**.

**c. Sasaran III** "Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh" dengan Indikator "Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh, terdapat realisasi sebesar **36.80%** dari target **51,47%** atau capaian sebesar **71,49%** dengan kriteria "Tinggi".

**Sasaran IV** "Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah", dengan realisasi sebesar **72,55** dari target **75** sehingga capaian sebesar **96,75%**, dengan kriteria "Sangat Tinggi".

Berdasarkan analisis capaian setiap indikator maka dapat dijelaskan untuk Tujuan "Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas, dengan indikator 'Persentase Permukiman Layak Huni, terdapat realisasi sebesar 99,11% dari target 99,32% atau capaian sebesar 99,79% dengan kriteria" Sangat Tinggi". Hal ini didukung oleh capaian kinerja kegiatan dalam Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni bersumber dari dana APBD Tahun 2023 Kota Balikpapan sebanyak 100 unit rumah penerima bantuan untuk perbaikan/peningkatan kualitas berupa bantuan sosial barang seperti Material/Bahan Bangunan sebagai stimulan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menerima bantuan untuk berswadaya secara berkelompok gotong-royong melaksanakan perbaikan masing-masing rumah secara bergantian. Terdapat 11 Kelurahan Penerima Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (BSPKRTLH) Tahun 2023 yaitu: 1.Kelurahan Karang Rejo 2. Kelurahan Karang Jati 3. Kelurahan Gunung Sari Ulu 4. Kelurahan Sumber Rejo 5. Kelurahan Sungai Nangka 6. Kelurahan Baru Ilir 7. Kelurahan Manggar Baru 8. Kelurahan Karang Joang 9. Kelurahan Damai 10. Kelurahan Prapatan 11. Kelurahan Klandasan Ilir.

Pada capaian kinerja target sasaran strategis pada tahun 2023 terdapat 2 (dua) indikator dengan kriteria penilaian realisasi kinerja "Sangat Tinggi", namun hanya 1 (satu) indikator yang mencapai target 100%.

Adapun capaian yang belum 100% adalah sebagai berikut:

1. Pada sasaran II kriteria kinerja "sangat tinggi" namun belum tercapai 100% karena masih banyaknya PSU perumahan yang belum diserahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan. Berdasarkan data, baru sebesar 4963 unit rumah dalam perumahan yang difasilitasi PSU dan diserahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan dari 40,152 unit rumah.
2. Pada sasaran III diperoleh kriteria penilaian realisasi kinerja "sedang" atau belum tercapai karena capaian penanganan Kawasan kumuh untuk di target 2023 sebesar 3,99 sudah tercapai namun masih terdapat kawasan kumuh di atas 10 Ha yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan di atas 15 Ha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, pada tahun 2023 hanya terdapat penanganan dari Pemerintah Kota Balikpapan. Adapun penanganan kumuh tahun 2023 berupa Pekerjaan Penanganan Sistem Sanitasi Permukiman Kumuh di Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan berupa Pembangunan IPAL Komunal Skala Permukiman, Perbaikan saluran Drainase, dan Jalan Lingkungan. Pada tahun 2023 terdapat luasan kawasan kumuh baru sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-203/2023 Tentang Hasil Peninjauan Ulang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Balikpapan.
3. Pada sasaran IV tidak tercapai 100% karena nilai LHE atas SAKIP Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2022 mengalami penurunan yang semula tahun 2021 sebesar 74,57 di tahun 2022 menjadi 72,55. Komponen penilaian turun pada komponen Perencanaan Kinerja.

**b. Realisasi Kinerja Berdasarkan indikator kinerja kunci (IKK)**

Analisa capaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman harus didasarkan pada indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator

Kinerja Kunci (IKK) bidang urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

a. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

SPM yang harus diacu oleh Dinas Perumahan dan Permukiman, terdapat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum. SPM Perumahan Rakyat yang diampu oleh Disperkim Kota Balikpapan ,sebagaimana dimaksud adalah sebagi berikut:

1. Jenis Pelayanan Dasar ,terdiri atas:

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

2. Mutu Pelayanan Dasar, terdiri atas :

- a) mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana /kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.
- b) standar jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa setiap unit rumah rusak akibat bencana sesuai dengan rencana jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.
- c) kualitas pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
- d) mutu pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.
- e) standar jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa setiap rumah tangga terkena relokasi sesuai dengan jumlah



rencana fasilitasi dan penyediaan rumah layak huni yang akan ditangani.

- f) kualitas pelayanan dasar sebagaimana dimaksud padahuruf b ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas masing-masing layanan terhadap fasilitasi dan rumah layak huni.
- b. Penerima Pelayanan terdiri atas:
- 1. penerima pelayanan dasar dari Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria.
  - 2. penerima pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah yaitu setiap rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria.

Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Capaian kinerja urusan pemerintahan terdiri atas Indikator Kinerja Kunci Keluaran (IKK *Output*) dan Indikator Kinerja Hasil (IKK *Outcome*).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjabarkan bahwa Urusan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki 20 IKK *Output* dan 5 IKK *Outcome*.

Berikut dilampirkan capaian kinerja penyelenggaraan Urusan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang diampu Disperkim Kota Balikpapan pada Tahun 2023:

Tabel 3.4

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan IKK Tahun 2023

No	Indikator	SPM/	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi	Proye	Catatan Analisis
		standar nasional		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	√		0	18	36	54	72	0	8	Penyediaan rumah korban bencana mulai dilakukan tahun 2023, Berdasarkan pendataan Tahun 2022 terdapat 74 unit rumah yang harus di fasilitasi dan di muat dan dipetakan selama 5 tahun dalam Rencana Aksi Daerah SPM Kota Balikpapan, namun belum terdapat SK Penetapan Bencana.
2	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	√		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	0,00%	Berdasarkan hasil pendataan SPM tahun 2023 tidak terdapat warga negara yang harus direlokasi akibat program Pemerintah Daerah
3	Persentase Permukiman Layak Huni		√	99,05	99,32	99,55	99,78	100,00	99,11	99,55	Persentase permukiman layak huni sampai dengan akhir tahun 2023 telah mencapai 9,11% dari target kinerja. Disperkim Kota Balikpapan memiliki kewenangan mengurangi kawasan kumuh seluas 5,4 Ha. Luasan tersebut ditangani sebesar 1,41 Ha pada tahun 2022 dan 3,99 di tahun 2023.

No	Indikator	SPM/ stand ar nasio nal	IK K	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proye ksi	Catatan Analisis
				Tah un 202 2	Tahu n 2023	Tahu n 2024	Tahu n 2025	Tahu n 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni		√	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,00	0,02	Tahun 2022 Kegiatan hanya berupa pendataan. Penyediaan rumah korban bencana mulai dilakukan tahun 2023. Berdasarkan pendataan Tahun 2022 terdapat 74 unit rumah yang harus di fasilitasi dan di muat dan dipetakan selama 5 tahun dalam Rencana Aksi Daerah SPM Kota Balikpapan. Pada tahun 2023 direncanakan akan di sediakan rumah layak huni sebanyak 15 rumah.
5	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU		√	16,75	12,18	18,18	28,26	36,42	12,18	18,18	Realisasi indikator sasaran ini adalah sebesar 12,18% . Pencapaian ini didukung oleh peningkatan iklim investasi di kota Balikpapan sebagai pendukung Ibu Kota Negara (IKN) yang berpengaruh terhadap bertumbuhnya sektor perumahan dan mengakibatkan peningkatan yang signifikan terhadap rumah yang terfasilitasi PSU namun belum seluruh PSU diserahkan ke Pemerintah Kota

No	Indikator	SPM/ stand ar nasio nal	IK K	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proye ksi	Catatan Analisis
				Tah un 202 2	Tahu n 2023	Tahu n 2024	Tahu n 2025	Tahu n 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh		√	32,5 6	51,4 7	67,7 8	84,0 8	100, 00	36,80	51,47	Target Penanganan kumuh ditangani oleh Pemerintah Pusat melalui Kotaku untuk luasan kumuh diatas 15 Ha, Pemerintah Provinsi untuk luasan kumuh 10 Ha- 15 Ha, dan penanganan melalui dana APBD Kota untuk luasan kumuh dibawah 10 Ha. Pada akhir tahun 2022 telah tertangani 52,42 Ha kawasan kumuh dengan penangan oleh Kotaku seluas 51,01 Ha dan penanganan melalui APBD Kota Balikpapan seluas 1,41 Ha di RT. 4 Kelurahan Damai , Kecamatan Balikpapan Kota. Tahun 2023 terdapat 3,99 Ha penanganan kumuh.
7	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota		√	0,00	0,01	0,01	0,02	0,03	0,00	0,01	.Berdasarkan pendataan Tahun 2022 terdapat 74 unit rumah yang harus di fasilitasi dan di muat dan dipetakan selama 5 tahun dalam Rencana Aksi Daerah SPM Kota Balikpapan. Pada tahun 2023 direncanakan akan di sediakan rumah layak huni sebanyak 15 rumah, namun tidak terdapat SK penetapan bencana

No	Indikator	SPM/ stand ar nasio nal	IK K	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proye ksi	Catatan Analisis
				Tah un 202 2	Tahu n 2023	Tahu n 2024	Tahu n 2025	Tahu n 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	sesuai pendataan SPM Tahun 2023, tidak terdapat masyarakat yang harus direlokasi
9	persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kota yang di tangani		√	26,11	100,00	0,00	0,00	0,00	3,99	11,08	Penanganan kawasan kumuh Kota Balikpapan melalui APBD Kota Balikpapan seluas 1,41 Ha di RT. 4 Kelurahan Damai
10	berkurangnya jumlah unit RTLH (rumah tidak layak huni)		√	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,002	0,003	pada 2023 terverifikasi menjadi sebanyak 517 RTLH. kemudian ditangani sebanyak 66 ditahun 2022 dan 100 unit ditahun 2023 RTLH yang bersumber dari APBD
11	jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)		√	16.75	12.18	18.18	28.26	36.42	12,18	18,18	Target penambahan unit rumah yang dilengkapi PSU dan diserahkan adalah sebesar 4,963 unit rumah namun berdasarkan pendataan total unit rumah diperumahan yang dilengkapi PSU adalah 40,755 unit rumah di perumahan di Kota Balikpapan.
12	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya		√	0	18	36	54	72	14.074	15	7.146 unit pada daerah resiko bencana longsor  4.898 unit pada daerah resiko rawan abrasi  2.030 unit pada daerah resiko kebakaran hutan

No	Indikator	SPM/ stand ar nasio nal	IK K	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proye ksi	Catatan Analisis
				Tah un 202 2	Tahu n 2023	Tahu n 2024	Tahu n 2025	Tahu n 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Jumlah rumah yang terkena bencana alam		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	Tahun 2023 Kegiatan hanya berupa pendataan. Penyediaan rumah korban bencana Tahun 2022 terdapat 74 unit rumah yang harus di fasilitasi dan di muat dan dipetakan selama 5 tahun dalam Rencana Aksi Daerah SPM Kota Balikpapan. Pada tahun 2023 direncanakan akan di sediakan rumah layak huni sebanyak 15 rumah namun belum terdapat SK Penetapan bencana
14	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156	0	4 unit rumah korban bencana angin laut  8 unit rumah korban bencana alam angin puting beliung  144 unit rumah rusak akibat longsor
15	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi		√	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0	8	sesuai pendataan SPM Tahun 2023 Tidak terdapat kegiatan rehabilitasi rumah korban bencana
16	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10	sesuai pendataan SPM Tahun 2023 Tidak terdapat kegiatan pembangunan kembali untuk rumah korban bencana
17	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	sesuai pendataan SPM Tahun 2023 Tidak terdapat kegiatan pembangunan baru untuk korban bencana

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IK K	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	7	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rusunawa Sepinggan</li> <li>2. Rusunawa Perusda</li> <li>3. Rusunawa Manggar</li> <li>4. Rusunawa Siaga</li> <li>5. Rusunawa Sumber</li> <li>6. Rusunawa KM7</li> <li>7. Rusunawa Beriman</li> </ul>
19	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	sesuai pendataan SPM Tahun 2023, Tidak terdapat kegiatan Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kab/kota
20	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan		√	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	116,81	116,81	sesuai pendataan SPM Tahun 2023, Lokasi 1: Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Kota Lokasi 2, 3 & 4 : Kel. Gr. Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan Lokasi 5 : Kel. Lamaru, Kec. Balikpapan Timur Lokasi 6 & 7 : Kel. Teritip, Kec. Balikpapan Timur Lokasi 8 : Kel. Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara
21	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	Tidak ada kegiatan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM

No	Indikator	SPM/ stand ar nasio nal	IK K	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proye ksi	Catatan Analisis
				Tahun 202 2	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	pemenuhan SPM										
22	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	Tidak ada kegiatan fasilitasi ganti hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM
23	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM		√	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada rumah tangga yang menerima layanan subsidi sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM
24	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		√	0	0	0	0	0	0	0	Tidak terdapat kegiatan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM pada tahun 2023
25	Jumlah rumah tangga penerima layanan belum mendapatkan penyediaan rumah pemenuhan SPM layak huni berdasarkan rencana		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74	74	Lokasi 74KK tersebar di 23 Kelurahan dan 6 Kecamatan. Tahun 2023 terdapat 74 unit rumah yang harus di fasilitasi dan di muat dan dipetakan selama 5 tahun dalam Rencana Aksi Daerah SPM Kota



No	Indikator	SPM/ stand ar nasio nal	IK K	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proye ksi	Catatan Analisis
				Tah un 202 2	Tahu n 2023	Tahu n 2024	Tahu n 2025	Tahu n 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Balikpapan. Pada tahun 2023 direncanakan rumah yang terkena bencana alam akan menjadi 59 unit akan di sediakan rumah layak huni sebanyak 15 rumah.
26	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah		√	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0	Tidak terdapat kegiatan pengadaan tanah untuk relokasi pada tahun 2023
27	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha		√	3,99	0,00				29,92	0	apaian Pengurangan Kumuh Kota Balikpapan Tahun 2023 seluas 3,99 Ha. Luas Kumuh di Kota Balikpapan per Tahun 2023 seluas 0 Ha (SK.Walikota Tahun 2020), namun erbit SK.Walikota Nomor : 188.45-203/2023 Tentang Hasil Peninjauan Ulang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Balikpapan dengan Luasan Kumuh baru seluas 29,92 dikarenakan pada tahun 2023 terdapat penanganan kawasan kumuh seluas 3,99 Ha maka sisa luasan kawasan kumuh seluas 25,93 Ha
28	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH		√	26,00	355,00	251,00	499,00	389,00	100	250	Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni bersumber dari dana APBD Tahun 2023 Kota

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IK K	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proye ksi	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Balickpapan sebanyak 100 unit rumah penerima bantuan untuk perbaikan/peningkatan kualitas berupa bantuan sosial barang seperti Material/Bahan Bangunan sebagai stimulan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menerima bantuan untuk berswadaya secara berkelompok gotong-royong melaksanakan perbaikan masing-masing rumah secara bergantian.
29	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh		√	49,91	78,90	103,90	128,90	153,30	3,99	11,08	Pekerjaan Penanganan Sistem Sanitasi Permukiman Kumuh di Kelurahan Damai berupa Pembangunan IPAL Komunal Skala Permukiman, Perbaikan saluran Drainase, dan Jalan Lingkungan.
30	Jumlah rumah di kab/kota		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202539		Jumlah rumah formal dan swadaya tahun 2022 dari pendataan RP3KP tahun 2022
31	Jumlah unit PK RTLH		√	26	355	251	499	389	100	250	11 Kelurahan Penerima Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (BSPKRTLH) Tahun 2023 : 1. kelurahan karang rejo 2. kelurahan karang jati

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IK K	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proye ksi	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											3. kelurahan gunung sari ulu 4. kelurahan sumber rejo 5. kelurahan sungai angka 6. kelurahan baru ilir 7. kelurahan manggar baru 8. kelurahan karang joang 9. kelurahan damai 10. kelurahan prapatan 11. kelurahan klandasan ili
32	Jumlah rumah yang layak huni		√	5565	5210	4959	4460	4071	351	258	Jumlah Data Baseline Rumah Tidak Layak Huni yang akan ditangani di Kota Balikpapan sesuai Target Renstra Disperkim
33	Jumlah rumah yang tidak dihuni		√	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	Belum dilakukan pendataan
34	Rasio rumah dan KK		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202539:249748		
35	Jumlah rumah pembangunan baru		√	13176	18176	23176	28176	33176	240		109 unit Rumah Swadaya 131 unit Rumah Formal
36	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU		√	35524	37300	39165	41123	43179	4963	2446	Perumahan yang terfasilitasi PSU dandiserahkan ke Pemerintah Kota
37	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum		√	22245	43145	48873	53760	59136	116.014 unit		jumlah unit rumah yang terlayani:  s.d akhir tahun 2022 = 115.049 unit  tahun 2023 = 965 unit
38	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan		√	0	0	0	0	0	202539		Jumlah rumah eksisting Kota Balikpapan tahun 2022

No	Indikator	SPM/	IK K	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proye ksi	Catatan Analisa
		stand ar nasio nal		Tah un 202 2	Tahu n 2023	Tahu n 2024	Tahu n 2025	Tahu n 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)		√	0	0	0	0	0	0	0	Kewenangan SPM Akses Sanitasi (On Site/Off Site) Tahun 2023 sudah di Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan
40	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH		√	0	0	0	0	0	6	6	Perumahan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Balikpapan
41	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU		√	0	0	0	0	0	40755		Jumlah rumah eksisting Kota Balikpapan tahun 2023
42	Jumlah pengembang yang tersertifikasi		√	122	122	122	122	122	0	0	Tidak ada pengembang yang tersertifikasi di tahun 2023
43	Jumlah pengembang yang terregistrasi		√	122	122	122	122	122	0	0	Tidak ada pengembang yang terregistrasi di tahun 20223 karena TIM SRP2 belum terbentuk
44	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan		√	50	50	50	50	50	16	50	13 Perusahaan Pengembang  3 Asosiasi Perumahan
45	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni		√	0	0	0	0	0	0	0	Tidak terdapat update data.
46	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni		√	0	0	0	0	0	0	0	sesuai pendataan SPM Tahun 2023, tidak terdapat masyarakat yang harus direlokasi

No	Indikator	SPM/ stand ar nasio nal	IK K	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proye ksi	Catatan Analisis
				Tah un 202 2	Tahu n 2023	Tahu n 2024	Tahu n 2025	Tahu n 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.		√	2,75	2,57	2,45	2,22	2,01	16,81	0,26	Tahun 2023 terdapat 3,99 penaganan kumuh, terdapat SK kumuh baru tahun 2023 sebesar 29,92 untuk di bawah 10 Ha
48	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.		√	97,25	97,43	97,55	97,88	97,99	99,83	99,95	Terdapat 351 rumah tidak layak huni

### 3.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dengan tujuan untuk melihat keberhasilan organisasi difokuskan pada capaian indikator kinerja sasaran. Evaluasi dan analisis terhadap kegiatan lebih terfokus untuk menilai efisiensi dan efektifitas dikaitkan dengan Sumber Daya Manusia (SDM), dana, sarana, prasarana, metode kerja dan hal-hal lain yang terkait.

Analisis capaian kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan di masa yang akan datang.

Analisis dapat dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

**a. Realisasi Kinerja Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama**

Tabel 3.5  
Realisasi Kinerja Tahun 2021-2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Realisasi		% Peningkatan /Penurunan Tahun 2022
					2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	11 = (6-5)/5*100
1	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	Persen	0	0	99.83%	(terdapat revisi rumus indikator tahun 2023)
2	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU	Persen	16.7	21.97	12.18	-80.38
3	Berkurangnya luas kawasan kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	Persen	0	34.19	36.8	7.09
4	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip DISPERKIM	Nilai	N/A	74.57	72.55	-2.78

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa tahun ini adalah tahun kedua realisasi kinerja dari indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, sehingga indikator kinerja yang dibandingkan adalah antara tahun 2023 dengan tahun 2022.

Adapun beberapa realisasi kinerja dari indikator kinerja di atas dapat dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2022 yaitu :

- a. Terdapat peningkatan trend realisasi pada indikator kinerja sebagai berikut:
  - 1) Presentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bahwa terdapat perubahan rumus hitung yang sebelumnya perhitungan berdasarkan jumlah rumah layak huni yang disediakan, difasilitasi oleh Kota Balikpapan melalui penyediaan rumah korban bencana, rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program terhadap jumlah rumah di Kota Balikpapan kemudian ditambah terkait dukungan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), sehingga pada tahun 2022 tidak terdapat capaian kinerja karena tidak ada rumah layak huni yang disediakan, difasilitasi oleh Kota Balikpapan melalui penyediaan rumah korban bencana, rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program. Pada tahun 2023 terdapat kegiatan Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni bersumber dari dana APBD Tahun 2023 Kota Balikpapan sebanyak 100 unit rumah penerima bantuan untuk perbaikan/peningkatan kualitas berupa bantuan sosial barang seperti Material/Bahan Bangunan sebagai stimulan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menerima bantuan untuk berswadaya secara berkelompok gotong-royong melaksanakan perbaikan masing-masing rumah secara bergantian. Terdapat 11 Kelurahan Penerima Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (BSPKRTLH) Tahun 2023 yaitu: 1. Kelurahan Karang Rejo 2. Kelurahan Karang Jati 3. Kelurahan Gunung Sari Ulu 4.

Kelurahan Sumber Rejo 5. Kelurahan Sungai Nangka 6. Kelurahan Baru Ilir 7. Kelurahan Manggar Baru 8. Kelurahan Karang Joang 9. Kelurahan Damai 10. Kelurahan Prapatan 11. Kelurahan Klandasan Ilir.

- 2) Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh, dikarenakan berdasarkan Berita Acara Penetapan Pengurangan Luasan Kumuh Tahun 2024 Tingkat Kota Nomor 663/0018/Disperkim, bahwa capaian pengurangan kumuh Kota Balikpapan Tahun 2023 sebesar 3,99 Ha sehingga sisa luas kumuh Kota Balikpapan menjadi 100,70 Ha dengan dasar Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-203/2023 Tentang Hasil Peninjauan Ulang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Balikpapan dengan luas 104,69 Ha. Pada tahun 2023 tidak ada intervensi penanganan dari Provinsi dan Pusat sehingga pengurangan luasan Kawasan kumuh kurang optimal.

b. Terdapat indikator kinerja mengalami trend penurunan yaitu:

- 1) Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU, hal ini dikarenakan terdapat perubahan rumusan dimana yang sebelumnya mengukur persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU. Unit Rumah adalah jumlah unit rumah di dalam perumahan formal, menjadi Mengukur persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU. Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU adalah jumlah keseluruhan unit rumah dalam perumahan yang sedang maupun sudah dibangun oleh pengembang/ developer yang terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah dibuktikan dengan berita acara serah terima PSU Unit Rumah adalah jumlah unit rumah di dalam perumahan formal. Pada tahun 2022 data perhitungan PSU adalah data PSU belum diserahkan ke Pemerintah Daerah dan untuk tahun 2023 PSU yang sudah di serahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan. Pada tahun 2023 baru sebesar 4963 unit rumah dalam perumahan yang difasilitasi PSU yang



diserahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan dari total 40,152 unit rumah.

- 2) Nilai Sakip DISPERKIM, nilai SAKIP dalam LHE atas SAKIP Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2022 mengalami penurunan yang semula tahun 2021 sebesar 74,57 di tahun 2022 menjadi 72,55. Komponen penilaian turun pada komponen Perencanaan Kinerja.

### 3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis

Capaian kinerja sasaran ini diperoleh dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.7  
Realisasi Kinerja Utama yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	$7 = 5/6 \times 100$
1	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	Persen	99.83	100	99.83
2	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU	Persen	12.18	36.42	33.44
3	Berkurangnya luas kawasan kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	Persen	36.8	100.00	36.8

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	$7 = 5/6 \times 100$
4	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip DISPERKIM	Nilai	72.55	80.00	90.69

Berdasarkan Tabel 3.7 dapat dijelaskan bahwa pada pelaksanaan tahun pertama Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dari 4(empat) indikator kinerja utama belum seluruhnya mencapai target jangka menengah pada Renstra, hal ini dikarenakan baru pelaksanaan tahun kedua dalam target indikator kinerja jangka menengah pada Renstra, selanjutnya akan akan terus ditingkatkan capaian target kinerja pada pelaksanaan tahun berikutnya.

### 3.2.4 Realisasi Kinerja Mengacu pada Standar Nasional/ Lainnya

Capaian kinerja ini dihitung berdasarkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/ lainnya.

Adapun perbandingan capaian kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dengan standar nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8  
Realisasi Kinerja yang mengacu pada Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi Nasional 2023	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	$7 = 5/6 \times 100$
1	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	Persen	99.83	0,00	tidak dapat diperbandingkan
2	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU	Persen	12.18	0,00	tidak dapat diperbandingkan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi Nasional 2023	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7 = 5/6*100
3	Mengurangi luas kawasan kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	Persen	36.8	0,00	tidak dapat diperbandingkan
4	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip DISPERKIM	Nilai	72.55	0,00	tidak dapat diperbandingkan

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi kinerja Disperkim Kota Balikpapan tidak dapat diperbandingkan.

### 3.2.5 Analisis Penyebab Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Pada sub bab ini menguraikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dengan menyajikan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.9  
Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja)					
				Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
				(90,01% ≤ 100%)	(75,01% ≤ 90%)	(65,01% ≤ 75 %)	(50,01% ≤ 65 %)	(≤ 50 %)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	100	v					
2	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU	83.98	v					

3	Mengurangi luas kawasan kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	71.49	v				
4	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip DISPERKIM	96.73	v				

Tabel diatas menjelaskan bahwa pengukuran pencapaian kinerja Dissperkim Kota Balikpapan Tahun 2023 dinyatakan berhasil. Adapun analisa penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya cakupan rumah layak huni. Sasaran ini Mengukur persentase rumah layak huni yang disediakan, difasilitasi oleh kota Balikpapan melalui penyediaan rumah korban bencana, rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program dan pemberian bantuan RTLH terhadap jumlah rumah di Kota Balikpapan. Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase rumah layak huni. Rumus perhitungan sasaran ini adalah

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase rumah layak huni} &= \frac{\text{Jumlah penyediaan rumah layak huni}}{\text{Jumlah total unit rumah Kota Balikpapan}} \times 100 \% \\
 &= \frac{=202188}{202.539} \times 100 \% \\
 &= 99.83\%
 \end{aligned}$$

Pada tahun 2022, Berdasarkan hasil pendataan rumah yang terdampak pada tahun 2022 terdapat 74 unit yang terverifikasi untuk dilakukan penanganan pada tahun mendatang dari 225 unit rumah terdata dengan Pendataan By Name By Address (BNBA) yang valid yang rencana dilaksanakan di tahun 2023 namun tidak terlaksana karena belum terdapat SK Penetapan Bencana. Pada tahun 2023 tidak terdapat pemberian bantuan layak huni bagi korban bencana dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program karena tidak terdapat bencana. Pada tahun 2023 telah dilaksanakan bantuan

Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni bersumber dari dana APBD Tahun 2023 Kota Balikpapan sebanyak 100 unit rumah penerima bantuan untuk perbaikan/peningkatan kualitas berupa bantuan sosial barang seperti Material/Bahan Bangunan sebagai stimulan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menerima bantuan untuk berswadaya secara berkelompok gotong-royong melaksanakan perbaikan masing-masing rumah secara bergantian.

2. Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai. Sasaran ini mengukur persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU. Sasaran ini diwakilkan oleh indikator Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU dan diserahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan. Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU adalah jumlah keseluruhan unit rumah dalam perumahan yang sedang maupun sudah dibangun oleh pengembang/developer yang terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah dibuktikan dengan berita acara serah terima PSU Unit Rumah adalah jumlah unit rumah di dalam perumahan formal.

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU} &= \frac{\text{Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah total unit rumah Kota Balikpapan}} \times 100 \% \\
 &= \frac{4963}{40.755} \times 100 \% \\
 &= 12.18 \%
 \end{aligned}$$

Target kinerja sasaran Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai Tahun 2023 adalah sebesar 12.18% dengan capaian sebesar 83.98%. terdapat 40.755 unit rumah dalam perumahan yang telah dibangun namun baru 4963 yang telah diserahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan. Tumbuhnya perumahan di

Kota Balikpapan di dukung oleh peningkatan iklim investasi di kota Balikpapan sebagai pendukung Ibu Kota Negara (IKN) yang berpengaruh terhadap bertumbuhnya sektor perumahan dan mengakibatkan peningkatan yang signifikan terhadap rumah yang terfasilitasi PSU. Laju pertumbuhan penduduk memicu *backlog* perumahan di kota besar termasuk di Balikpapan sehingga dibutuhkan hunian untuk masyarakat dan pegawai yang cukup banyak. Sektor perumahan merupakan sektor yang bertumbuh positif karena memiliki efek berganda *multiplier effect* yang dapat menghidupkan 174 sub sektor industri lain seperti pabrik material bahan bangunan, transportasi, lembaga pembiayaan seperti Bank, Koperasi, *financial*, teknologi, dan perdagangan. Bertumbuhnya sektor perumahan selain karena peningkatan iklim investasi sebagai dukungan terhadap IKN di Kalimantan Timur, juga didukung oleh adanya program sejuta rumah Kementerian PUPR yang menjadikan terfasilitasinya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk dapat memiliki rumah yang terfasilitasi PSU dengan baik. Peningkatan rumah yang terfasilitasi PSU tidak serta merta lepas dari pengawasan Disperkim Kota Balikpapan dalam pemenuhan kualitas dan kewajiban PSU. Ketercapaian target kinerja ini tetap memerlukan konsistensi dan komitmen antara pengembang perumahan dan Disperkim sebagai *leading sector* bidang perumahan rakyat untuk mendukung ketersediaan PSU perumahan yang memadai. Hal ini ditandai oleh komitmen pimpinan Disperkim dengan terus dilakukannya pengawasan dan pengendalian serta evaluasi penyedia perumahan dalam penyediaan PSU yang memadai.

3. Mengurangi luas kawasan kumuh. Sasaran ini mengukur persentase berkurangnya luas kawasan kumuh sesuai dengan SK Luas Kumuh Kota Balikpapan Tahun 2020 seluas 153, 3 Ha. Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh.

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase berkurangnya} & \quad \frac{\text{Jumlah Luasan Kawasan}}{\text{Jumlah Luasan Kumuh sesuai}} \times 100 \% \\
 \text{luas kawasan kumuh} & \quad \frac{\text{Kumuh Kota ditangani}}{\text{SK Kumuh Walikota BPN}} \\
 = & \quad \frac{56,44 \text{ Ha}}{153,30 \text{ Ha}} \times 100 \% \\
 = & \quad 36,82 \%
 \end{aligned}$$

Target kinerja pengurangan luasan kawasan kumuh pada Tahun 2023 adalah sebesar 3,99 Ha. Target Penanganan kumuh tersebut ditangani oleh penanganan melalui dana APBD Kota untuk luasan kumuh dibawah 10 Ha namun tidak terdapat intervensi dari Pemerintah Pusat melalui Kotaku untuk luasan kumuh diatas 15 Ha dan Pemerintah Provinsi untuk luasan kumuh 10 Ha- 15 Ha . Pada akhir tahun 2022 telah tertangani 52,42 Ha kawasan kumuh dengan penangan oleh Kotaku seluas 51,01 Ha dan penanganan melalui APBD Kota Balikpapan seluas 1,41 Ha di RT. 4 Kelurahan Damai , Kecamatan Balikpapan Kota sehingga total capaian penanganan kumuh sebesar 56,44 Ha

4. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Disperkim yang di keluarkan oleh Inspektorat Kota Balikpapan dengan nilai 72,55. Evaluasi dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2022 menunjukkan nilai sebesar 72,55 dengan Predikat BB (Sangat Baik). Hal ini menunjukkan implementasi SAKIP sudah baik, namun masih perlu adanya perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong capaian kinerja adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	1 Adanya kerja sama dengan perangkat daerah dan instansi terkait	1 tidak terdapat fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena bencana dan relokasi program pemerintah kabuapten/kota, karena tidak ada bencana yang ditetapkan sebagai kejadian bencana.
		2 Tersusunnya Pembuatan Naskah Akademik Perda RP3KP	2 Belum disusunnya SPM Urusan perumahan
		3 Terlaksananya Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	3 belum ada SK Penetapan Bencana yang dijadikan dasar untuk memberi bantuan atau fasilitas rumah korban bencana dan atau relokasi korban pemerintah.
		4 Terlaksananya Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	4 Belum tersedianya data perumahan dan data rumah di kawasan rawan bencana yang ter-update secara periodik
		5 adanya kerjasama dengan Fasilitator Lapangan (TFL) Rehabilitasi dan pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	5 Banyak calon penerima belum memenuhi kriteria dikarenakan status lahan dan bangunan
		6 Tersusunnya Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Perwali Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Dampak Bencana	6 pada tahun 2023 pekerjaan yang dilaksanakan adalah Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus dengan output kinerja berupa Legalisasi dokumen (Naskah Akademik),
		7 Tersusunnya Site Plan / DED Bagi Rumah Korban Bencana	7 belum ada SK Penetapan Bencana yang dijadikan dasar untuk memberi bantuan atau fasilitas rumah korban bencana dan atau relokasi korban pemerintah.



No	Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		8 Adanya Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun	8 belum sesuai perencanaan perumahan dengan data topografi/kontur kawasan perumahan dan data kepemilikan lahan, adanya alih fungsi pemanfaatan lahan non komersial di dalam kawasan perumahan, rendahnya pelaksanaan pengawasan pengembangan perumahan
		9 Adanya Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang mengatur tarif sewa retribusi rusunawa	9 belum adanya DED untuk pembangunan rumah baru sebagai dasar pembangunan untuk pembangunan baru
		10 Adanya aplikasi SIMRUSUN untuk pengelolaan penerimaan sewa retribusi rusunawa	10 tidak terdapat bencana yang ditetapkan sebagai kejadian bencana
		11 Pengembangan Aplikasi Master Data Perumahan	11 Belum ada kesediaan calon penerima untuk menerima bantuan pembangunan akibat dilaksanakan secara swadaya
		12 Terlaksananya Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Sektor Perumahan	12
		13 Terlaksananya Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Perencanaan Perumahan dan Lingkungan	13 Belum terbentuknya Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) di RUSUNAMI
		14 Terlaksananya Sosialisasi Sertifikasi Pengembang Pengembangan Perumahan	14 Kurangnya SDM di UPTD Rusunawa
		15 Tersusunnya (Review) Siteplan Perumahan PNS Km 7,5 Kel Graha Indah	15 Terdapat kondisi gedung Rusunawa yang tidak layak huni
			16 Kurangnya informasi kepada masyarakat terkait data perumahan yang berizin
			17 Masih adanya masyarakat yang

No	Sasaran	Faktor Pendorong		Faktor Penghambat	
					membeli rumah tidak berizin
				18	Belum adanya data perumahan terintegrasi berbasis sitem informasi yang dapat diakses masyarakat
2	Berkurangnya luas kawasan kumuh	1	Adanya kerjasama dengan perangkat daerah dan instansi terkait dalam penanganan kawasan kumuh kota	1	tidak adanya intervensi penanganan kumuh dari Pemerintah Provinsi untuk luasan di atas 10 Ha dan Pemerintah Pusat untuk luasan diatas 15 Ha pada tahun 2023
		2	Kolaborasi dan sinergi antarg perangkat daerah dan instansi terkait (POKJA Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kota Balikpapan)	2	tidak adanya intervensi penanganan kumuh dari Pemerintah Provinsi untuk luasan di atas 10 Ha dan Pemerintah Pusat untuk luasan diatas 15 Ha pada tahun 2023.
		3	Tersusunnya Penyusunan Kajian Pendataan dan Verifikasi Kumuh pada 11 Kelurahan Kota Balikpapan	3	Pada tahun 2023 terbit Kembali SK kumuh baru seluas 104.69 Ha berdasarkan SK Walikota Balikpapan Nomor 188.45-203/2023 Tentang Hasil Peninjauan Ulang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Balikpapan, bahwa terdapat penetapan jumlah lokasi dan luasan berdasarkan kegiatan RP2KPKPK Tahun 2022.
		4	Terlaksananya kegiatan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) Kota Balikpapan	4	Masih terdapat kawasan Kumuh dan Potensi munculnya Kawasan kumuh Baru
		5	Terlaksananya Penanganan Sistem Sanitasi Permukiman Kumuh di Kelurahan Damai	5	Masih terdapat Rumah Masyarakat yang Tidak Layak Huni di Kota Balikpapan

No	Sasaran	Faktor Pendorong		Faktor Penghambat	
		6	Terlaksananya Bantuan Sosial Barang Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 100 unit	6	Belum tersedianya data lengkap rumah tidak layak huni yang terverifikasi dan update periodik secara digital
		7	Adanya kerjasama dengan Tenaga Fasilitator Lapangan / Tenaga Pendamping / Surveyor Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	7	Pada tahun 2023 tidak terdapat Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh dalam renja dan DPA tahun 2023.
				8	Pada tahun 2023 tidak terdapat kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota dalam renja dan DPA tahun 2023.
3	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai	1	Terdapat 6 PSU perumahan yang dilakukan peningkatan/pemeliharaan , yaitu perumahan Kumala Residence 4, Kumala Residence 5, Sepinggian Pratama, Taman Sari Bukit Mutiara, Balikpapan Permai, Balikpapan Baru terhadap 288 jumlah lingkungan perumahan berdasarkan pada Renstra	1	Terdapat Pengembang belum mengajukan permohonan penyerahan PSU
		2	adanya Perwali 22/2014 ; Perwali 16/2018	2	Belum intensifnya pelaksanaan monitoring pemanfaatan PSU
		3	Terlaksananya Sosialisasi Penyerahan PSU Perumahan	3	Tingkat penyerahan PSU rendah
		4	Adanya kerjasama dengan para pengembang perumahan, perangkat daerah dan instansi/ lembaga terkait	4	Proses Penyerahan PSU masih njlimet
				5	Data kurang update dan informatif
				6.	Keterbatasan layanan perbaikan lampu PJU dikarenakan belum ada peralatan yang memadai

No	Sasaran	Faktor Pendorong		Faktor Penghambat	
				7.	Masih terdapat kawasan perumahan yang belum terlayani PSU yang memadai
4	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1	Komitmen pimpinan untuk pencapaian target kinerja	1	Belum seluruh pegawai memahami dokumen perencanaan perangkat daerah
		2	Koordinasi dan kerjasama yang baik secara internal dan eksternal perangkat daerah terkait	2	Pengukuran kinerja belum dilaksanakan tepat waktu karena adanya data kinerja yang tidak tersediasecara realtime
				3	Analisa dan evaluasi capaian kinerja belum dilakukan secara intensif
				4	Adanya perubahan peraturan yang menyebabkan perubahan sasaran, indikator dan target kinerja kinerja program penunjang.

### 3.2.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya merupakan kebutuhan utama suatu unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya keuangan/anggaran yang dimiliki Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2022. Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi  
 CKi : Capaian keluaran i (kolom 6)  
 PAKi : Pagu anggaran keluaran i (kolom 7)  
 RAKi : Realisasi anggaran keluaran i (kolom 8)

**Tabel 3.10.**

**Tingkat efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja Pada dinas perumahan dan permukiman kota Balikpapan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (E)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	99.83	99.83	100	7,904,553,500.00	6,116,719,568.00	77.38	22.62
2	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU	14.5	12.18	84	4,954,855,500.00	4,692,025,137.00	94.70	-
3	Mengurangi luas kawasan kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	51.47	36.8	71.49	4,165,648,800.00	3,981,926,232.00	95.59	-
4	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip DISPERKIM	75	72.55	96.73	10,998,758,868.00	9,079,551,966.00	82.55	17.45
<b>Jumlah</b>					<b>88.05</b>	<b>28,023,816,668.00</b>	<b>23,870,222,903.00</b>	<b>85.18</b>	<b>-</b>

Analisis Tingkat efisiensi merupakan penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja Pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan menunjukkan bahwa penyerapan anggaran untuk pencapaian kinerja sasaran Dinas Perumahan dan

Permukiman sudah relatif baik meskipun terdapat anggaran yang tidak terserap seluruhnya. Efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana dikatakan efisiensi jika capaian kinerja telah mencapai 100% atau lebih dengan anggaran yang mencukupi.

Pada tahun 2023 Disperkim Kota Balikpapan terdapat efisiensi pada sasaran "Meningkatnya cakupan rumah layak huni sebesar 100% telah tercukupi oleh anggaran Rp. 6,116,719,568.00 dan memiliki capaian penyerapan anggaran 77.38 %. Tingkat efisiensi sebesar 22.62 %, dengan Program Pengembangan Perumahan, kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan dengan capaian realisasi anggaran dengan **kriteria" sangat tinggi"**, yaitu:
  - a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran sebesar 99,60%,
  - b. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran sebesar 89,29%,
  - c. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan serta Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dengan realisasi anggaran sebesar 82,23%
2. Kegiatan dengan kriteria capaian realisasi anggaran" **sangat rendah "** yaitu **Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan realisasi 24,45%** dikarenakan tidak terdapat fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena bencana dan relokasi program pemerintah kabuapten, karena tidak ada bencana yang ditetapkan sebagai kejadian bencana. Adapun kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana **(kriteria capaian anggaran sangat rendah).**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang terehabilitasi dengan target 5 unit namun terealisasi 0 dikarenakan tidak adanya realisasi rehabilitasi rumah bagi korban bencana dikarenakan tidak terdapat bencana yang ditetapkan sebagai kejadian bencana sehingga realisasi anggaran hanya 10.83% yang terdiri dari belanja alat tulis kantor, belanja kertas cover, bahan komputer dan belanja cetak penggandaan.

- b. Sub Kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus. **(kriteria capaian anggaran sangat tinggi).**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan target 1 dokumen dan terealisasi 100%. Realisasi anggaran sebesar 98,35% dari target Rp. 100.000.000 atau sebesar Rp.98.354.880.

- c. Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana . **(kriteria capaian anggaran rendah).**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun dengan target 10 unit namun terealisasi 0 dikarenakan tidak adanya realisasi pembangunan rumah bagi korban bencana dikarenakan tidak terdapat bencana yang ditetapkan sebagai kejadian bencana sehingga realisasi anggaran sebesar 15.68 % dari total target Rp.455.000.000 yang terdiri dari belanja pedukung saja seperti belanja alat tulis kantor, belanja kertas cover, bahan komputer

dan belanja cetak penggandaan, dan telah tersusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Perwali Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Dampak Bencana.

### **3.2.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)**

Laporan kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2023 memuat analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja) sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:



Tabel 3.11

## Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	100,00	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota	-
				Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Rumah yang telah dilakukan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	100
				Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	100
				Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat yang bersedia di Relokasi akibat Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah	0%
				Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/ Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
				Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	100
				<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	-
				Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang terehabilitasi	0.00
				Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.00
				Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	0.00
				<b>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>	<b>Persentase hunian Rusun milik pemerintah Kota yang terkelola</b>	<b>89.89</b>
				Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/ Penghuni Rumah Susun	100.00
				Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/ atau Rumah Khusus	100.00
				<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</b>	<b>Persentase Perumahan yang sesuai rencana tapak</b>	<b>28.02</b>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100.00
				Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan umum/rumah susun umum	100.00
				<b>Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)</b>	<b>Jumlah Rekomendasi Teknis Sarusun yang diterbitkan</b>	-
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	100.00
2	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU	84.00	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase peningkatan PSU pada lingkungan perumahan	100,00
				Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Luasan PSU yang dibangun dan dipelihara	100,00
				Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan yang disusun	100,00
				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah penyediaan PSU melalui penerbitan rekomendasi siteplan perumahan	30,00
				Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Rapat Koordinasi Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	100,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
3	Mengurangi luas kawasan kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	71.50	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	Luasan Kawasan Kumuh	130.23
				Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Luasan (ha) Penanganan infrastruktur Kawasan Kumuh	71.50
				Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Lokasi Perumahan dan permukiman Kumuh	100.00
				Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	100.00
				Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Pemukiman Kumuh	100.00
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	100.00
				Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (site plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh	100.00
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak yang Diperbaiki	100.00
				Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/ Dipugar Kumuh	100.00
Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	100.00				

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
4	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip DISPERKIM	116,78	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>IKM Internal Perangkat Daerah</b>	<b>96.73</b>
				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>103.19</b>
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	126.92
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>104.72</b>
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100.00
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	125.00
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	200.00
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	452.50
				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>76.39</b>
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	416.67

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100.01</b>
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.00
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100.00
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100.00

Berdasarkan tabel diatas tentang analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut:

I. Sasaran strategis Meningkatnya cakupan rumah layak huni tercapai dengan dukungan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Perumahan

Indikator kinerja program pengembangan perumahan adalah Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota. Target kinerja tahun 2023 sebesar 0.59%. Pada tahun 2023, realisasi indikator program ini adalah sebesar 0%. Formulasi indikator sub kegiatan ini adalah untuk menunjang penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi program sesuai pelayanan yang diwajibkan oleh Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat. Pada Tahun 2023 tidak terdapat fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena bencana dan relokasi program pemerintah kabuapten/kota, karena tidak ada bencana yang ditetapkan sebagai kejadian bencana namun telah dialokasikan anggaran dalam DPA Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2023 untuk program tersebut.

Tingkat capaian anggaran program pengembangan perumahan mencapai 77.38% dari pagu anggaran Rp.7.904.553.500,- dan terealisasi Rp. 6.116.719.568,-

Program pengembangan perumahan terdiri atas beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.

Indikator kinerja kegiatan ini merupakan gambaran pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) perumahan rakyat. Target kinerja kegiatannya adalah persentase rumah yang telah dilakukan pendataan sebesar 27.58 % dengan

capaian 100%. Nilai target merupakan rumusan dari perencanaan terhadap rumah yang dilakukan pendataan sebanyak 700 unit rumah dibandingkan dengan 2.538 unit rumah di lokasi kelurahan Gunung sari ulu, Baru ulu dan Prapatan yang mencukupi untuk pemetaan rumah di lokasi rawan bencana dan relokasi di Kota Balikpapan.

Realisasi target kinerja adalah 0% dikarenakan pada tahun 2023 pekerjaan yang dilaksanakan adalah Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus dengan output kinerja berupa Legalisasi dokumen (Naskah Akademik). Namun pada tahun 2023 telah terdapat pendataan rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan penanganannya sebanyak 14.074 unit dengan rincian 7.146 unit pada daerah risiko bencana longsor, 4.898 unit pada daerah risiko rawan abrasi, 2.0230 unit pada daerah resiko kebakaran hutan. Capaian realisasi keuangan kegiatan ini adalah sebesar 96.60 % dari anggaran Rp.25.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.24.900.000,- .

Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota terdiri dari beberapa sub kegiatan diantaranya :

- 1) Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus. Realisasi keuangan

Sub kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota memiliki capaian realisasi keuangan sebesar 96.60 % dari anggaran Rp.25.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.24.900.000,- . Sisa anggaran merupakan sisa kontrak Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Naskah Akademik Perda RP3KP.

Realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah



Susun dan Rumah Khusus dengan target 1 dokumen dan capaian target 100%

- b. Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.

Indikator kegiatan Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota adalah persentase masyarakat yang bersedia di relokasi akibat korban bencana dan relokasi program pemerintah. Target Renja perubahan tahun 2023 adalah sebesar 0,59 %. Target ini memiliki formulasi jumlah masyarakat yang bersedia menerima bantuan rumah korban bencana atau relokasi berdasarkan jumlah rumah korban bencana/relokasi yang disediakan dibandingkan dengan jumlah data rumah By Name By Address (BNBA) yang harus berikan bantuan rumah korban bencana/relokasi atau target 15 rumah tangga dibagi jumlah total rumah yang betrada pada rawan bencana sebanyak 2538. pada tahun 2023 Tidak terdapat penyediaan bantuan rehabilitasi dan pembangunan rumah korban bencana serta bantuan relokasi dikarenakan tidak ada bencana yang ditetapkan sebagai kejadian bencana, sehingga realisasi target masyarakat yang bersedia di berikan bantuan adalah 0. Kegiatan ini memiliki capaian realisasi keuangan sebesar 89.29% dengan realisasi anggaran sebesar Rp.126.650.000,- dari anggaran sebesar Rp.113.090.560,-.

Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan, yaitu:

- 1) Sub kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana.

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota. Sub kegiatan ini memiliki capaian

kinerja 100%, dari target 100 orang. Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat atau Sukarelawan tanggap bencana sudah terealisasi pada 15 Juni 2023. Sub kegiatan ini memiliki capaian realisasi keuangan sebesar 92,77 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp.59.700.000,- dari anggaran sebesar Rp.55.383.600,. Sisa anggaran merupakan sisa Belanja Cetak dan Penggandaan Sosialisasi Standar Teknis dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota.

- 2) Sub Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP.

Sub kegiatan ini mempunyai indikator jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP, dengan target 50 orang dan capaian 100%. Adapun realisasi keuangan sebesar 86.19% atau realisasi sebesar Rp. 57.706.960 dari target Rp.66.950.000,-. Terdapat sisa anggaran belanja Kelengkapan Peserta Sosialisasi KPR-FLPP, belanja honorarium dan transportasi akomodasi Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP.

- c. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.

Indikator kegiatan ini adalah Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan target 0.59% namun realisasi 0% dikarenakan tidak terdapat bencana yang ditetapkan sebagai kejadian bencana di tahun 2023. Realisasi anggaran tahun 2023 sebesar 24.45% atau Rp. 196.792.668,- dari target anggaran Rp. 805.000.000, dengan kategori sangat rendah. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya realisasi rehabilitasi rumah bagi korban bencana dikarenakan tidak terdapat bencana yang ditetapkan sebagai kejadian bencana.

Adapun kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

1) Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang ter rehabilitasi dengan target 5 unit namun terealisasi 0 dikarenakan tidak adanya realisasi rehabilitasi rumah bagi korban bencana dikarenakan tidak terdapat bencana yang ditetapkan sebagai kejadian bencana sehingga realisasi anggaran hanya 10.83% yang terdiri dari belanja alat tulis kantor, belanja kertas cover, bahan komputer dan belanja cetak penggandaan.

2) Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus.

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan target 1 dokumen dan terealisasi 100%. Realisasi anggaran sebesar 98,35% dari target Rp. 100.000.000 atau sebesar Rp.98.354.880.

3) Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun dengan target 10 unit namun terealisasi 0 dikarenakan tidak adanya realisasi pembangunan rumah bagi korban bencana dikarenakan tidak terdapat bencana yang ditetapkan sebagai kejadian bencana sehingga realisasi anggaran sebesar 15.68 % dari total target Rp.455.000.000 yang terdiri dari belanja pedukung saja seperti belanja alat tulis kantor, belanja kertas cover, bahan komputer

dan belanja cetak penggandaan, dan telah tersusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Perwali Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Dampak Bencana namun belum ditetapkan.

**d. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**

Indikator kegiatan ini adalah persentase hunian rusun milik pemerintah kota yang terkelola. Target kegiatan ini adalah sebesar 70.83%. Target ini didapat dari rumusan target hunian rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang terisi sebanyak 544 hunian terhadap keseluruhan hunian di 9 rusunawa milik Pemerintah Kota Balikpapan sebanyak 768 kamar. Realisasi dari target ini adalah sebesar 59,05 % didapat dari terisinya 489 hunian terhadap keseluruhan hunian rusunawa yang tersedia. Evaluasi yang dilakukan terkait tidak tercapainya target tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang rusunawa dan terdapat rusunawa yang tidak layak di huni karena kondisi lahan yang berbahaya atau miring. Adapun Capaian realisasi keuangan kegiatan ini adalah sebesar 77,25%. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.6.092.903.500,- dan terealisasi sebesar Rp.5.009.983.993.

Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:

- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun.

Indikator kinerja sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun adalah Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/ Penghuni Rumah Susun dengan target 1 dokumen dan terealisasi 100%. Jumlah rumah susun yang dikelola dengan target 4 (empat) unit rusunawa yang fisiknya dilakukan peningkatan dan pemeliharaan terealisasi

pemeliharaan dan peningkatan sebanyak 6 (lima) unit rusunawa yang terdiri atas rusunawa Sepinggian I, Sepinggian II, Perusda, Sumber, Siaga dan Km 7. Realisasi keuangan anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun adalah sebesar Rp. 3.764.814.399 dan terealisasi sebesar Rp.4.272.903.500 dengan capaian realisasi sebesar 88.11%. anggaran yang terserap kurang optimal karena kurangnya Peningkatan dan Supervisi Peningkatan Rusun Sumber.

2) Sub Kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/ atau Rumah Khusus dengan target 1 dokumen dan terealisasi 100%. Berdasarkan data keterisian hunian jumlah kamar rusunawa yang terhuni dengan target kamar terhuni sebanyak 544 kamar. Realisasi dari target ini adalah terisinya 489 hunian terhadap keseluruhan hunian rusunawa yang tersedia. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang rusunawa dan terdapat gedung rusunawa yang dalam kondisi tidak layak huni karena kondisi tanah yang miring yaitu Rusunawa Manggar yang dapat membahayakan jika dihuni. Realisasi keuangan sub kegiatan ini memiliki capaian realisasi keuangan sebesar 68.42% yang didapat dari perhitungan realisasi keuangan Rp. 1.245.169.594 terhadap anggaran sebesar Rp. 1.820.000.000,. Anggaran yang tidak terserap optimal adalah Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rusunawa, Belanja Perabot Kantor Rusunawa, Belanja Pakaian Dinas Lapangan, Belanja Internet Rusunawa, Belanja Insentif tenaga Operasional dan tenaga keamanan non ASN Rusun serta sisa belanja rutin gaji tenaga non ASN Rusunawa.

#### **e. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.**

Kegiatan ini memiliki indikator persentase perumahan yang sesuai rekomendasi rencana tapak. Target indikator kegiatan ini adalah sebesar 11.84% yang didapat dari 27 perumahan yang sesuai rencana tapak terhadap 228 perumahan yang ada di kota Balikpapan. Realisasi kegiatan sampai dengan tahun ini adalah jumlah perumahan sesuai rekomendasi rencana tapak yang diberikan adalah 10 perumahan yaitu *baseline* 2021 terdapat 7 perumahan sesuai rencana tapak dan 3 perumahan sesuai rencana tapak yang diterbitkan. Pada tahun 2023 ada 6 rekomendasi teknis yang diterbitkan. Sehingga capaian kinerja sebesar 7,02 %. Ketidaktercapaian target dikarenakan dilakukannya pengetatan kriteria dalam rekomendasi rencana tapak dalam usaha mendukung pengendalian banjir Kota Balikpapan. Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp. 728.128.547 dari anggaran sebesar Rp.805.000.000,- atau memiliki capaian keuangan sebesar 90.45%. Kegiatan ini memiliki beberapa sub kegiatan , diantaranya adalah:

##### 1) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dengan target 1 dokumen dan realisasi 100%. Capaian indikator ini adalah 100%. Realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp. 575.276.127,- dari anggaran sebesar Rp.650.000.000,- atau memiliki capaian keuangan sebesar 88.50%. Terdapat belanja yang realisasinya 0 yaitu Belanja Cetak Dan Penggandaan, Perlengkapan Peserta Sosialisasi Sertifikasi Pengembang Pengembangan Perumahan, Fotocopy Dokumen

Rekomendasi Siteplan Perumahan, Dokumentasi Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Sektor Perumahan, Sosialisasi Sertifikasi Pengembang - Dokumentasi Pengembangan Perumahan Belanja Cetak HAPERNAS 2023, Rapat Kerja Peningkatan Kualitas Perencanaan Perumahan dan Lingkungan (Piagam/Sertifikat), Bendera Beraneka Warna Hapernas 2023, Fotocopy Materi Peningkatan Kualitas Ruang Kota melalui Konektivitas Kawasan Perumahan, Rapat Kerja Peningkatan Kualitas Perencanaan Perumahan dan Lingkungan (Seminar Kit), Rapat Kerja Peningkatan Kualitas Perencanaan Perumahan dan Lingkungan (Standing Banner), Pembahasan Dokumen Siteplan Perumahan, Peninjauan Lokasi Permohonan Siteplan Perumah, Seragam Lapangan, Transportasi dan Akomodasi Narasumber Rapat Kerja Peningkatan Kualitas Perencanaan Perumahan, dan Honorarium Hapernas 2023.

- 2) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum.

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan umum/rumah susun umum dengan target 1 dokumen dan realisasi sebesar 100%. Realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp. 152.852.420,- dari anggaran sebesar Rp.155.000.000,- atau memiliki capaian keuangan sebesar 98.61%. Terdapat belanja dengan realisasi rendah yaitu belanja Fotocopy Dokumen Penyusunan (Review) Siteplan Perumahan PNS Km 7,5.

**f. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB).**

Kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Rekomendasi Teknis Sarusun yang diterbitkan. Target indikator kegiatan ini adalah sebesar 10 unit dengan realisasi 0. Ketidaktercapaian target dikarenakan. Tidak terdapat penerbitan SKGB. Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp.43.823.800 dari anggaran sebesar Rp.50.000.000,- atau memiliki capaian keuangan sebesar 87.65%.

Kegiatan ini terdiri dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB). Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) dengan target 1 dokumen dan realisasi 100%. Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp.43.823.800 dari anggaran sebesar Rp.50.000.000,- atau memiliki capaian keuangan sebesar 87.65%. Terdapat belanja yang realisasinya sedang yaitu Belanja Cetak dan Penggandaan SKGB dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat SKGB.

**II. Sasaran Strategis Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai,** tercapai dengan dukungan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU).

Program ini memiliki indikator persentase peningkatan PSU pada lingkungan perumahan dengan target kinerja 2.08 % yang didapat dari 6 perumahan terhadap 288 jumlah lingkungan perumahan dan terealisasi 100%. Berdasarkan pemutakhiran data perumahan tahun 2023, terdapat 140 perumahan.



Realisasi keuangan program ini adalah sebesar 94.70% dimana realisasi keuangan adalah Rp.4.692.025.137,- dari anggaran Rp.4.954.855.500. Program ini terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan memiliki indikator kinerja jumlah Luasan PSU yang dibangun dan dipelihara dengan target 1 Ha dan terealisasi 100%. Capaian keuangan kegiatan ini adalah sebesar 94.70 % dimana realisasi keuangan adalah Rp.4.692.025.137 dari anggaran Rp.4.954.855.500,-.

Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan terdiri dari beberapa sub kegiatan, yaitu:

1) Sub kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan penyediaan psu perumahan yang disusun sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 100% dengan menghasilkan dokumen revisi Perda 5 Tahun 2013 , dokumen pendataan PSU Perumahan se Kota Balikpapan dan dokumen perencanaan penyediaan taman serta dilaksanakan sosialisasi penyerahan PSU Perumahan. Realisasi keuangan sub kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan memiliki capaian realisasi keuangan sebesar 87.05% , yaitu dari anggaran Rp. 100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.87.046.945,-. Terdapat belanja dengan kriteria sangat rendah yaitu belanja Honorarium Narasumber Sosialisasi Penyerahan PSU Perumahan, belanja Transportasi dan akomodasi Narasumber Sosialisasi Penyerahan PSU Perumahan.

2) Sub kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

Indikator sub kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian adalah Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang menunjang Fungsi Hunian. Target kinerja tahun 2023 adalah 3 lokasi Pekerjaan. Telah dilaksanakan pada 5 titik lokasi PSU di, Claster Denhag, Claster Pesona Cuontry , Cluster Arizona, dan terealisasi 100%. Capaian realisasi keuangan sebesar 94.96 %, yaitu dari anggaran Rp.4.581.643.292,- dan terealisasi sebesar Rp.4.824.855.500,-. Terdapat realisasi belanja yang tidak terealisasi yaitu belanja Konsumsi Aktivitas Lapangan Sub Kegiatan Penyediaan PSU Perumahan dan terdapat belanja dengan kriteria sedang yaitu belanja Pembuatan dan Pemasangan Papan Informasi PSU Perumahan dan Konsumsi Rapat Sub Kegiatan Penyediaan PSU Perumahan.

- 3) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

Indikator sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan adalah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan, dengan target kinerja 1 laporan dan terealisasi 100%. Capaian realisasi keuangan sebesar 77,78 %, yaitu dari anggaran Rp. 23.334.900,- dan terealisasi sebesar Rp.30.000.000,-. Terdapat belanja yang tidak terealisasi yaitu Honor Panitia Tim Verifikasi PSU dan belanja dengan kriteria capaian sedang yaitu Konsumsi Aktivitas Lapangan Koordinasi dan Sinkronisasi PSU.

### **III. Sasaran strategis Mengurangi luas kawasan kumuh,**

Sasaran ini tercapai dengan dukungan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

#### **1. Program Kawasan Permukiman.**

Berdasarkan SK Walikota Balikpapan nomor 188.45-326/2020 tentang Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Balikpapan menyatakan bahwa luasan kumuh kota Balikpapan adalah 153,3 Ha. Program ini memiliki sasaran untuk mengurangi kawasan kumuh menjadi 0 Ha pada tahun 2026 dengan berbagi kewenangan pengurangan dengan Kementerian (Pusat) untuk pengurangan diatas 15 ha dan Provinsi Kalimantan Timur untuk pengurangan 10 -15 Ha. Berdasarkan pemetaan pada saat penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, kewenangan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan adalah pengurangan kawasan kumuh Kelurahan Damai seluas 5,4 Ha. Target yang ditetapkan pada tahun 2023 untuk penangan kumuh sebesar 3.99 Ha dimana di tahun 2022 luasan kawasan kumuh yang telah tertangani seluas 1,41 Ha sehingga target 2023 seluruh luasan kumuh di bawah 10 Ha dapat tertangani dan luasan kumuh Kota Balikpapan menjadi 74.40 Ha. Adapun realisasi kinerja luasan kumuh Kota Balikpapan menjadi 96.89 Ha atau kurang dari target 74.40, hal ini karena tidak adanya intervensi penanganan kumuh dari Pemerintah Provinsi untuk luasan di atas 10 Ha dan Pemerintah Pusat untuk luasan diatas 15 Ha. Pada tahun 2023 terbit Kembali SK kumuh baru seluas 104.69 Ha berdasarkan SK Walikota Balikpapan Nomor 188.45-203/2023 Tentang Hasil Peninjauan Ulang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Balikpapan, bahwa terdapat penetapan jumlah lokasi dan luasan berdasarkan kegiatan RP2KPKPK Tahun 2022. Realisasi keuangan program ini adalah Rp.3.981.926.232,- dari anggaran sebesar Rp.4.165.648.800,- dengan capaian sebesar 87.65%. Program ini

terdiri dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha.

Kegiatan ini memiliki indikator kinerja Jumlah Luasan (ha) Penanganan infrastruktur Kawasan Kumuh dengan target 78.9 Ha, hal ini dikarenakan tidak adanya intervensi penanganan kumuh dari Pemerintah Provinsi untuk luasan di atas 10 Ha dan Pemerintah Pusat untuk luasan diatas 15 Ha. Realisasi kegiatan ini adalah sebesar 56,41 Ha atau capaian sebesar 71,50 %. Realisasi keuangan ini adalah sebesar Rp. 641.392.061 dari target Rp.679.354.300 atau terealisasi 94,41%.

Kegiatan ini memiliki sub kegiatan sebagai berikut:

1) Sub kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Realisasi keuangan

Sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Hasil Survei dan Lokasi Perumahan dan permukiman Kumuh dengan target 1 dokumen dan terealisasi 1dokumen dengan capaian 100%. Sub kegiatan ini memiliki anggaran Rp. 55.646.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 55.195.300,- dengan capaian realisasi 99.19%.

2) Sub kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan target 2 dokumen dan realisasi capaian 100%. Sub kegiatan ini memiliki anggaran Rp. 524.699.600 dan terealisasi sebesar Rp. 489.740.261,- dengan capaian realisasi 93.34%. Terdapat belanja yang tidak terealisasi yaitu Alat Tulis Kantor, fotocopy, cetak, rapatKegiatan Rapat Kerja POKJA PKP.

3) Sub kegiatan Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh.

Sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Pemukiman Kumuh dengan target 7 laporan yang merupakan 7 laporan kelurahan kumuh dan realisasi capaian 100%.

Sub kegiatan ini memiliki anggaran Rp. 96.456.500,- dan terealisasi sebesar Rp.99.008.700,- dengan capaian realisasi 97.42%. Terdapat belanja dengan kriteria capaian rendah yaitu Belanja Barang Cetak untuk Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh.

b. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.

Kegiatan ini memiliki indikator Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani dengan target tahun 2023 sebesar 100 % yang didapat dari jumlah Luas Kawasan Kumuh dibawah 10 ha yang ditangani tahun 2022 seluas 1,41 Ha dan tahun 2023 seluas 3.99 Ha terhadap 5,4 Ha kawasan kumuh di bawah 10 ha di Kelurahan Damai. Realisasi kinerja kegiatan ini adalah 100%. Anggaran yang terserap dari kegiatan ini adalah Rp. 3.340.534.171,- dari Rp. 3.486.294.500,- atau capaian 95.82%.

Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

1) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh.

Sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Rencana Tapak (site plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh dengan target 1 dokumen DED & Site PPlan Penanganan Kumuh kelurahan Karang Rejo dan terealisasi 100 %. Capaian realisasi

keuangan sebesar 99,06% atau Rp. 102.155.600,- dari target keuangan sebesar Rp. 103.128.500,-. Terdapat belanja yang tidak terealisasi yaitu Fotocopy untuk Kegiatan Peninsulas Dokumen Site Plan dan DED Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh.

- 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh.

Indikator jumlah Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/ Dipugar Kumuh dengan target kinerja 3.99 Ha dan terealisasi 100%. Penanganan dilakukan di RT. 01 Kelurahan Damai. Sub kegiatan ini memiliki capaian realisasi keuangan senilai 86,58% atau dari anggaran Rp. 1.001.909.800,- terealisasi sebesar Rp.867.444.541,-. Terdapat belanja yang tidak terealisasi yaitu Pengadaan Barang untuk Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Damai.

- 3) Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.

Indikator sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni adalah Jumlah Rumah Tidak Layak yang Diperbaiki dengan target 100 unit dan terealisasi 100%.

Sub kegiatan ini memiliki capaian keuangan senilai 99,63% atau Rp. 2.294.869.680,- dari target anggaran sebesar Rp.2.202.388.000,-. Anggaran yang tidak terserap merupakan efisiensi pembelian alat tulis kantor dan makan minum rapat.

- 4) Sub kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh.

Indikator sub kegiatan Pendataan dan verifikasi penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh adalah Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi dengan target 1 dokumen verifikasi Sepinggan Raya dan terealisasi 100% dengan tersedianya dokumen

pendataan RTLH tahun 2023, pemuktahiran data RTLH tahun 2023 dan verifikasi kawasan kumuh.

Sub kegiatan ini memiliki capaian keuangan senilai 97.68% atau Rp. 76.064.350,- dari target anggaran sebesar Rp.77.868.200,-. Anggaran yang tidak terserap merupakan efisiensi pembelian alat tulis kantor dan makan minum rapat.

#### 2. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh.

Pada tahun 2023 tidak terdapat Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh dalam renja dan DPA tahun 2023. Program ini memiliki indikator Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Target kinerja pada tahun 2023 dalam Renstra Disperkim Tahun 2021-2026 adalah 0,01% dari formulasi 26 peningkatan kualitas RTLH terhadap jumlah rumah di Kota Balikpapan sejumlah 202.539 unit (baseline Renstra Disperkim Tahun 2021-2026). Program ini dilaksanakan di tahun 2022 dengan realisasi sebesar 0.033% atau realisasi jumlah peningkatan kualitas rumah tidak layak huni diluar SK kumuh sebanyak 66 unit. Adapun target sampai dengan tahun 2026 adalah 0.12% atau 252 unit rumah terhadap 202539 unit rumah. Program ini dilaksanakan di tahun 2022 dengan realisasi sebesar 0.033% atau realisasi jumlah peningkatan kualitas rumah tidak layak huni diluar SK kumuh sebanyak 66 unit. Realisasi keuangan program ini adalah 96,08% atau Rp.1.558.037.500,- terealisasi Rp.1.497.019.284,-.

#### **IV. Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.**

**Sasaran ini** tercapai dengan dukungan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2023 adalah IKM Internal Perangkat

Daerah dengan target kinerja 75 dan terealisasi sebesar 76.50. Realisasi skor 76.50 ini memiliki arti bahwa mutu pelayanan internal sekretariat Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan memiliki nilai B atau dikatakan berkinerja baik.

Program ini terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Target kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah Nilai hasil evaluasi SAKIP Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan yang dikeluarkan oleh Inspektorat yaitu sebesar 75 dan terealisasi 72.55 dengan tingkat capaian kinerja 96.73%. Indikator kegiatan ini telah ditarik menjadi indikator sasaran Perangkat Daerah sesuai dengan Surat Sekretaris Dearah Nomor 060.4/01799/Org tanggal 22 Desember 2023 Perihal Penyusunan Pejanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023. Kegiatan ini tidak memiliki anggaran.

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri atas sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Sub Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub kegiatan ini tidak memiliki anggaran. Tidak dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen perencanaan Disperkim (Renstra dan Renja, Renja Perubahan) yang disusun dengan target 2 dokumen yaitu dokumen Renja Tahun 2023 Renja Perubahan 2023.

- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sub kegiatan ini tidak memiliki anggaran. Tidak dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)



Tahun 20223 Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen SAKIP (LKJIP) yang disusun dengan target 1 dokumen yaitu dokumen LKJIP Tahun 2022 dan terealisasi 100%.

3) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Realisasi keuangan:

Sub kegiatan ini tidak memiliki anggaran. Tidak dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen SAKIP (LKJIP) yang disusun dengan target 2 dokumen yaitu dokumen LKJIP Tahun 2022 dan dokumen evaluasi renja sehingga terealisasi 100%.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Target kinerja kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah adalah skor IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Disperkim sebesar 75 dan terealisasi dengan nilai 77,39 dengan tingkat capaian 103.19 % di akhir Desember 2023. Nilai skor tersebut berdasarkan dari Survey Kepuasan Pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan terhadap layanan internal keuangan Sekretariat Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan. Realisasi skor 77, 39 ini memiliki arti bahwa mutu pelayanan internal keuangan Disperkim memiliki nilai B atau dikatakan berkinerja baik. Realisasi keuangan kegiatan ini adalah sebesar Sementara itu realisasi keuangan sebesar Rp. 5.686.420.901 dari pagu sebesar Rp. 7.127.990.000 dengan tingkat capaian 79.78 %.

Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah terdiri atas sub kegiatan sebagai berikut

1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator kinerja sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN adalah Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN dengan target sebanyak 26 orang dan terealisasi sebanyak 33 orang dan terealisasi 126,%. Terdapat realisasi anggaran sebesar 79.78% dari pagu anggaran Rp.7.127.990.000 dengan realisasi sebesar Rp. 5.686.420.901. Ketidaktercapaian realisasi keuangan terjadi karena P3K bekerja dan pembayaran gajinya mulai dibayarkan pada triwulan IV tahun 2023.

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Target kinerja kegiatan administrasi umum perangkat daerah IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target skor 75 dan sesuai hasil IKM yang dilakukan didapat skor sebesar 78.54 dengan capaian 104.72%. Realisasi skor 78.54 ini memiliki arti bahwa mutu pelayanan internal administrasi umum memiliki nilai B atau dikatakan berkinerja baik.

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah terdiri atas beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator kinerja kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada TA.2023 adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dengan target kinerja 1 paket dan terealisasi sebesar 100% berupa pembelian komponen instalasi listrik/alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) yang digunakan untuk penerangan

bangunan kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2023. Realisasi anggaran sebesar 98.44% dari anggaran Rp. 14.975.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.741.000,-. Ketidaktercapaian realisasi keuangan merupakan selisih harga penawaran.

2) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator kinerja sub kegiatan penyediaan logistik kantor yaitu Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan dengan target sebanyak 4 paket dan terealisasi 5 paket atau capaian 125 %. Hal ini dikarenakan target kinerja dalam renja perubahan tidak dirubah. Realisasi anggaran sebesar 89 % dari pagu anggaran Rp.365.869.200,-dengan realisasi sebesar Rp. 325.608.300,-. Terdapat belanja yang tidak terealisasi yaitu Konsumsi Rapat Dengan Pihak Lain/Jamuan Tamu dan realisasi belanja dengan kriteria rendah yaitu Konsumsi Harian Pegawai, Konsumsi Rapat Struktural dan JFT (Perubahan), dan belanja natuna.

3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator kinerja sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan adalah Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan dengan target 2 paket dan terealisasi 4 paket atau capaian 200%. Hal ini dikarenakan target kinerja dalam renja perubahan tidak dirubah. Realisasi anggaran sebesar 90.92% dari pagu anggaran Rp.104.972.650,- dengan realisasi sebesar Rp. 95.437.000,-. Terdapat realisasi belanja yang belum optimal yaitu Cetak Spanduk Hari Peringatan dan belanja penggandaan.

4) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator kinerja sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

dengan realisasi sebesar 181 laporandari target 40 laporan dengan tingkat capaian 452.50%. Hal ini dikarenakan target kinerja dalam renja perubahan tidak dirubah. Realisasi keuangan sebesar 99.62 % dari pagu anggaran sebesar Rp.460.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 458.246.492,-.

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah adalah IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah dengan target kinerja skor IKM sebesar 75 dan terealisasi melebihi target dengan nilai sebesar 76.39 atau dapat dikatakan memiliki capaian kinerja sebesar 101.85 %. Realisasi nilai 76.39 ini memiliki arti bahwa mutu pelayanan internal pengadaan barang milik daerah Disperkim memiliki nilai B atau dikatakan berkinerja baik. Realisasi keuangan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp.1.140.983.800,- dan terealisasi sebesar Rp.1.162.275.400,- dengan capaian 98.17%.

Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terdiri atas sub kegiatan sebagai berikut:

1) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator kinerja sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya adalah Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan dengan target kinerja 6 paket dan terealisasi sebanyak 14 paket dengan tingkat capaian kinerja 416.67%. Dalam DPPA Tahun 2023 terdapat alokasi anggaran untuk 14 Unit pengadaan (cctv, intertive display (5 unit), AC 1.5 (2 unit), PC =6, Laptop=1, tablet=1, printer=6, switch hub=2, penangkal petir 1 namun target kinerja dalam renja perubahan tidak dirubah.

Pagu anggaran sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya adalah 1.162.275.400,- dan terealisasi sebesar Rp.1.140.983.800,- dengan tingkat capaian 98.17%. Ketidaktercapaian realisasi keuangan merupakan selisih harga penawaran.

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja kegiatan Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target kinerja skor IKM sebesar 75 dan terealisasi 75.01 dengan tingkat capaian 100.01 %. Realisasi skor 75.01 ini memiliki arti bahwa mutu pelayanan internal penyediaan jasa penunjang Disperkim memiliki nilai B atau dikatakan berkinerja baik. Realisasi keuangan dari kegiatan ini memiliki tingkat capaian 82,32 % dari anggaran Rp. 979.502.368,- dan terealisasi sebesar Rp.806.368.680,-.

Kegiatan Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri atas beberapa kegiatan sebagai berikut:

1) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator kinerja sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target 4 laporan yang merupakan pengiriman paket dokumen atau barang dan juga pembelian benda pos materai. Adapun realisasi kinerja hingga tanggal 31 Desember 2023 adalah 4 laporan atau pertriwulan dengan capaian 100%.

Pagu anggaran sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat adalah Rp.5.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,- dengan tingkat capaian 100 %.

2) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah Jumlah

Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan. Target kinerja sebanyak 4 laporan. Realisasi kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah 100 % atau 4 laporan yang dilaporkan per triwulan.

Pagu anggaran sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah sebesar Rp. 125.785.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 94.593.000,- dengan tingkat capaian 75.20%. Ketidaktercapaian realisasi keuangan dikarenakan anggaran yang tadinya akan digunakan untuk pembayaran tagihan listrik ketika dilakukan penambahan daya listrik. Ketidakstabilan aliran daya listrik ternyata tidak perlu diselesaikan dengan penambahan daya dan hal ini merupakan hasil koordinasi dengan pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN). Ketidakstabilan tersebut diatasi dengan pengaturan aliran listrik.

Dari sisi kinerja

3) Sub kegiatan Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pagu anggaran sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah sebesar Rp.848.717.368,- dan teralisasi sebesar Rp. 706.775.680,- dengan tingkat capaian sebesar 83.28%. Ketidaktercapaian realisasi keuangan dikarenakan kelebihan penganggaran pada jasa tenaga bantu non ASN dimana terdapat kekosongan posisi tenaga bantu non ASN.

Indikator sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yaitu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengantarget 12 laporan. Indikator ini terealisasi 100%. Sub kegiatan bertujuan untuk menyediakan bahan peralatan kebersihan, jasa kebersihan kantor, jasa keamanan kantor dan jasa tenaga bantu administrasi non ASN yang dilaporkan per bulan.

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah adalah IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah dengan target kinerja skor IKM sebesar 75 dan terealisasi melebihi target dengan skor sebesar 74,32 atau dapat dikatakan memiliki capaian kinerja sebesar 99.09 %. Realisasi skor 74.32 ini memiliki arti bahwa mutu pelayanan internal pemeliharaan barang milik daerah Disperkim memiliki nilai B atau dikatakan berkinerja baik. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 783.174.250 dan teralisasi sebesar Rp. 551.745.793 dengan capaian 70,45%.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah terdiri atas beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

1) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adalah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dengan target 33 unit kendaraan baik R2 maupun R4 yang dipegang oleh perorangan maupun jabatan. Realisasi target kinerja hingga akhir Desember 2023 adalah 29 unit kendaraan atau terealisasi 87.88%, hal ini dikarenakan terdapat 4 unit kendaraan jabatan dalam kondisi rusak berat yang tidak dapat dilakukan perbaikan.

Realisasi keuangan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adalah

sebesar Rp 227.193.848,- dari anggaran sebesar Rp.380.769.750,- atau sebesar 59.67% dengan kriteria sangat rendah. Ketidaktercapaian realisasi keuangan dikarenakan kurang terjadwalnya pemeliharaan servis dan pembelian suku cadang kendaraan jabatan.

- 2) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dengan target 2 unit dan terealisasi 2 unit kendaraan atau 100%.

Pagu anggaran sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah sebesar Rp. 115.157.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 78.797.088,- dengan tingkat capaian adalah 68,43 % atau kriteria capaian rendah Ketidaktercapaian realisasi keuangan disebabkan karena kurangnya penjagaan servis dan pembelian suku cadang kendaraan operasional atau lapangan.

- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator kinerja sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah Jenis Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara dengan target kinerja 7 unit kendaraan dan terealisasi sebanyak 111 unit peralatan mesin yang dipelihara dengan realisasi 87 unit atau tingkat capaian 78.38%. Hal ini dikarenakan pemeliharaan mesin absen, ac, komputer, printer dan jaringan internet dengan kondisi peralatan dan mesin dalam keadaan baik sehingga tidak memerlukan banyak perawatan dan masih sebagian unit masih dalam masa garansi.



Pagu anggaran sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah sebesar Rp. 87.247.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 47.839.250,- dengan tingkat capaian 54,83% atau kriteria capaian sangat rendah. Ketidaktercapaian realisasi keuangan karena lebihnya penganggaran untuk pemeliharaan mesin absensi yang masih dalam kondisi baru dan belum memerlukan pemeliharaan serta peralatan dan mesin yang lainnya masih dalam kondisi baik dan tidak memerlukan perbaikan. Terdapat realisasi belanja dengan kriteria sangat rendah yaitu belanja Pemeliharaan Printer, Pemeliharaan Komputer dan Laptop dan Suku Cadang Genset Gedung Kantor.

4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator kinerja sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi dengan target 1 unit gedung Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dan terealisasi 100% yaitu 1renovasi gedung kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.

Pagu anggaran sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah sebesar Rp.200.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 197.915.607,- dengan tingkat capaian 98,96%. Ketidaktercapaian realisasi keuangan merupakan selisih harga penawaran

Faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan serta tindak lanjut untuk mengatasi kendala pencapaian kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**1. Sasaran I “Meningkatnya cakupan rumah layak huni”**

Adapun faktor-faktor keberhasilan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Kerjasama dengan seluruh pihak terkait.
- b. Adanya data perumahan yang telah update.
- c. Terdapat aplikasi simrusun untuk pengelolaan retribusi sewa rusunawa.
- d. Adanya Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana.
- e. Adanya Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP.
- f. Tersusunnya Dokumen Naskah Akademik dan Perwali Petunjuk Teknis RP3KP.
- g. Adanya supervisi peningkatan kualitas gedung rusunawa
- h. Adanya penatausahaan pemanfaatan rusunawa.
- i. Adanya Sosialisasi Sertifikasi Pengembang Pengembangan Perumahan.
- j. Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum

Adapun faktor-faktor penghambat pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Belum terdapat proses bisnis, Review SOP dan standar pelayanan untuk penanganan bencana.
- b. Belum adanya peraturan internal terkait penanganan SPM urusan Bidang perumahan.
- c. Belum dibangunnya sistem informasi data perumahan dan permukiman terintegrasi.
- d. Belum optimalnya integrasi antara penyediaan perumahan dan sarana prasarannya
- e. Pemanfaatan lahan untuk perumahan yang belum efektif
- f. Masih adanya *backlog* kepemilikan rumah;
- g. Masih adanya rumah yang berada pada rawan risiko bencana.

Adapun tindak lanjut untuk mengatasi ketidaktercapaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Keandalan dan kelayakan yang dibangun secara swadaya perlu memperhatikan risiko bencana,
- b. Memberikan kemudahan fasilitasi perizinan dalam proses penyediaan perumahan
- c. Penyediaan lahan dan pembiayaan untuk sarana dan prasarana dasar dan perumahan MBR melalui penyediaan Rusunawa.
- d. Meningkatkan kualitas layanan rusunawa
- e. Revisi peraturan terkait pengelolaan rusunawa
- f. Meningkatkan Kerjasama dengan pihak perbankan terkait pembiayaan sewa retribusi rusunawa yang menjadi pendapatan Pemerintah Kota Balikpapan..
- g. Mengembangkan aplikasi SIMRUSUN bersama Diskominfo

## **2.Sasaran II “Berkurangnya luas kawasan kumuh”**

Faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan serta tindak lanjutnya, diantaranya sebagai berikut:

Faktor-faktor keberhasilan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Kerjasama dengan seluruh pihak terkait
- b. Adanya data permukiman yang telah update
- c. Adanya Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) Kota Balikpapan

Faktor-faktor penghambat pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Belum terdapat penyusunan proses bisnis, review SOP dan satandar pelayanan penanganan Kawasan kumuh.
- b. Belum dibangunnya sistem informasi data perumahan dan permukiman Terintegrasi.

- c. Pencegahan dan penanganan permukiman kumuh belum dilakukan secara terpadu.
- d. Belum optimalnya kolaborasi antar dinas terkait (Bappedalitbang, Dinas PU, BPBD, DPPR, dan DLH) dalam penanganan kumuh )
- e. Terdapat permukiman kumuh di atas 10 Ha-15Ha yang belum diintervensi Pemerintah Provinsi dan di atas 15 Ha yang belum diintervensi Pemerintah Pusat
- f. Adanya perpindahan penduduk dari daerah lain ke Kota Balikpapan akibat perpindahan Ibu Kota Negara menimbulkan potensi permukiman kumuh baru.
- g. belum optimalnya ketersediaan rumah layak huni serta rendahnya ketersediaan utilitas pemukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- h. Masih adanya permukiman illegal.
- i. Masih terdapat sarana dan prasarana permukiman yang belum terpenuhi.
- j. proses pengadaan barang dan jasa untuk penanganan rumah tidak layak huni yang memerlukan waktu relatif lama
- k. Penyusunan Dokumen Peraturan Wali Kota Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKPK) Kota Balikpapan

Adapun tindak lanjut untuk mengatasi ketidaktercapaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Penanganan permukiman kumuh kota secara inklusif
- b. perlunya memastikan ketersediaan pasokan material sesuai dengan waktunya dan melakukan pemetaan terhadap material yang dapat disubstitusi apabila terdapat kendala dalam penanganan RTLH.
- c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk penanganan kumuh kota.
- d. Update data perumahan dan kawasan permukiman secara periodik.

### **3. Sasaran III “Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai”**

#### **Faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan, diantaranya sebagai berikut:**

Adapun faktor-faktor keberhasilan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Kerjasama dengan seluruh pihak terkait.
- b. Adanya data PSU Perumahan yang telah update
- c. Adanya verifikasi PSU Perumahan yang dilaksanakan tim verifikasi PSU.

Adapun faktor-faktor penghambat pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Belum terdapat penyusunan proses bisnis, review SOP dan standar pelayanan terkait pengelolaan dan pemeliharaan PSU Perumahan.
- b. Belum dibangunnya system informasi data perumahan dan permukiman terintegrasi.
- c. Masih adanya PSU Perumahan yang belum diserahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan
- d. Sarana dan prasarana pemeliharaan PSU Perumahan yang belum memadai.

Adapun tindak lanjut untuk mengatasi ketidaktercapaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi secara intensif kepada pihak terkait untuk penanganan PSU Perumahan.
- b. Monitoring dan update data PSU Perumahan.
- c. Sosialisasi terkait peraturan tata cara penyerahan PSU.

#### 4. Sasaran IV “Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

##### **Faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan, diantaranya sebagai berikut:**

Adapun faktor-faktor keberhasilan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Kerjasama dengan seluruh pihak terkait
- b. Adanya update data pertriwulan yang telah update

Adapun faktor-faktor penghambat pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Belum terdapat penyusunan proses bisnis, SOP dan proses pengumpulan data, pengolahan data, pelaporan dan dan evalausi data kinerja.
- b. Belum dibangunnya system aplikasi kinerja dan data keuangan yang terintegrasi.

Adapun tindak lanjut untuk mengatasi ketidaktercapaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi internal secara intensif terkait monitoring dan evaluasi capaian kinerja masing-masing bidang.
- b. Meningkatkan koordinasi ke Bappeda Litbang, Bagian Organisasi dan Inspektorat secara intensif terkait monitoring dan evaluasi capaian kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.
- c. Melakukan inovasi untuk mendukung capaian kinerja
- d. Metode pengumpulan data secara efektif dan efisien

### 3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2023

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2023 sebesar 85.18 % dari total anggaran yang dialokasikan. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.12**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2023**

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket	Anggran (Rp)	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran (Rp)	(%)
		Keuangan (Rp)	(%)		
10401 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10,998,758,868.00	9,079,551,966.00	82,55	1,919,206,902.00	17,45
10401202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,127,990,000.00	5,686,420,901.00	79,78	1,441,569,099.00	20,22
10401206 Administrasi Umum Perangkat Daerah					
(2) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14,975,000.00	14,741,000.00	98,44	234.00	1,56
(3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	365,869,200.00	325,608,300.00	89	40,260,900.00	11
(4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	104,972,650.00	95,437,000.00	90,92	9,535,650.00	9,08
(5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	460,000,000.00	458,246,492.00	99,62	1,753,508.00	0,38
10401207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
(6) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,162,275,400.00	1,140,983,800.00	98,17	21,291,600.00	1,83
10401208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
(7) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000.00	5,000,000.00	100	-	0
(8) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	125,785,000.00	94,593,000.00	75,20	31,192,000.00	24,80
(9) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	848,717,368.00	706,775,680.00	83,28	141,941,688.00	16,72

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket	Anggran (Rp)	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran (Rp)	(%)
		Keuangan (Rp)	(%)		
10401209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
(10) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	380,769,750.00	227,193,848.00	59,67	153,575,902.00	40,33
(11) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115,157,000.00	78,797,088.00	68,43	36,359,912.00	31,57
(12) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	87,247,500.00	47,839,250.00	54,83	39,408,250.00	45,17
(13) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200,000,000.00	197,915,607.00	98,96	2,084,393.00	1,04
10402 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	7,904,553,500.00	6,116,719,568.00	77.38	1,787,833,932.00	22.62
10402201 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					
(14) Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	25,000,000.00	24,900,000.00	99,60	100.00	0,40
10402202 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	25,000,000.00	24,900,000.00	99,60	100.00	0,40



Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket	Anggran (Rp)	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran (Rp)	(%)
		Keuangan (Rp)	(%)		
(15) Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	59,700,000.00	55,383,600.00	92,77	4,316,400.00	7,23
(16) Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	66,950,000.00	57,706,960.00	86,19	9,243,040.00	13,81
10402203 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					
(17) Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	250,000,000.00	27,081,900.00	10,83	222,918,100.00	89,17
(18) Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100,000,000.00	98,354,880.00	98,35	1,645,120.00	1,65
(19) Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	455,000,000.00	71,355,888.00	15,68	383,644,112.00	84,32
10402205 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus					
(20) Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	4,272,903,500.00	3,764,814,399.00	88,11	508,089,101.00	11,89
(21) Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1,820,000,000.00	1,245,169,594.00	68,42	574,830,406.00	31,58
10402206 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan					

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket	Anggran (Rp)	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran (Rp)	(%)
		Keuangan (Rp)	(%)		
(22) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	650,000,000.00	575,276,127.00	88,50	74,723,873.00	11,50
(23) Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	155,000,000.00	152,852,420.00	98,61	2,147,580.00	1,39
10402207 Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)					
(24) Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	50,000,000.00	43,823,800.00	87,65	6,176,200.00	12,35
10403 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	4,165,648,800.00	3,981,926,232.00	95,59	183,722,568.00	4,41
10403202 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					
(25) Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	55,646,000.00	55,195,300.00	99,19	4,507.00	0,81
(26) Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	524,699,600.00	489,740,261.00	93,34	34,959,339.00	6,66
(27) Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	99,008,700.00	96,456,500.00	97,42	2,552,200.00	2,58
10403203 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket	Anggran (Rp)	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran (Rp)	(%)
		Keuangan (Rp)	(%)		
(28) Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	103,128,500.00	102,155,600.00	99,06	9,729.00	0,94
(29) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2,303,388,000.00	2,294,869,680.00	99,63	8,518,320.00	0,37
(30) Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	1,001,909,800.00	867,444,541.00	86,58	134,465,259.00	13,42
(31) Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	77,868,200.00	76,064,350.00	97,68	1,803,850.00	2,32
10405 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	4,954,855,500.00	4,692,025,137.00	94,70	262,830,363.00	5,30
10405201 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan					
(32) Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	100,000,000.00	87,046,945.00	87,05	12,953,055.00	12,95
(33) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	4,824,855,500.00	4,581,643,292.00	94,96	243,212,208.00	5,04
(34) Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	30,000,000.00	23,334,900.00	77,78	6,665,100.00	22,22
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>	<b>28,023,816,668.00</b>	<b>23,870,222,903.00</b>	<b>85.18</b>	<b>4,153,593,765.00</b>	<b>14.82</b>

### 3.4 Inovasi dan Penghargaan

#### a. Inovasi

Pada tahun 2023 Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan terdapat 2 inovasi aplikasi berbasis sistem informasi untuk mendukung tugas dan fungsi pada layanan bidang perumahan dan kawasan permukiman, yaitu:

##### 1. Pengembangan Aplikasi Master Data Perumahan

Merupakan Sistem Informasi yang menyediakan kanal informasi data sektor perumahan di Kota Balikpapan dalam bentuk informasi Digital untuk meningkatkan kualitas Basis Data Perumahan dan Permukiman yang informative dan handal serta peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat

##### 2. Aplikasi SIMRUSUN

Merupakan Aplikasi yang dapat membantu calon penyewa untuk melakukan pendaftaran sewa hunian rusunawa, melihat keterisian hunian, melakukan pembayaran uang sewa perbulan secara online melalui QRIS yang bekerjasama dengan Bank Kaltimara dan Diskominfo Kota Balikpapan. Aplikasi ini juga digunakan untuk pengelolaan penerimaan dan piutang retribusi sewa rusunawa.

#### b. Penghargaan

Pada Tahun 2023 Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan telah meraih penghargaan kategori “Terbaik Bidang Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman Tahun 2023”.

**Gambar 3.1  
Penghargaan**



## **BAB IV. PENUTUP**

Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman ini merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Permukiman dengan mengacu pada Rencana Strategis tahun 2021-2026. Laporan Kinerja ini merupakan Laporan Kinerja tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Penetapan ukuran kinerja, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja di setiap awal tahun berjalan, tidaklah semata-mata hanya ditujukan untuk menggambarkan ketercapaian target kinerja organisasi di akhir tahun. Akan tetapi, ada hal yang jauh lebih penting dari hal tersebut, dimana penetapan ukuran kinerja dijadikan sebagai acuan manajemen untuk mencapai kinerja yang paling maksimal. Evaluasi kinerja yang dilakukan pada laporan kinerja ini menunjukkan secara umum target kinerja di tahun 2023 telah tercapai.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atau LKJIP merupakan pertanggungjawaban untuk mengatur dan mengendalikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan guna tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai penyelenggara urusan perumahan dan kawasan permukiman, maka Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan senantiasa mengarahkan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengikuti perubahan isu strategis terkini.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2023 ini juga menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan kinerja capaian sasaran strategis yang ditunjukkan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan pada tahun anggaran 2023. Berbagai capaian sasaran strategis tersebut

tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun anggaran 2023.

Adapun beberapa simpulan keberhasilan capaian kinerja sasaran strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan tahun anggaran 2023 dapat diuraikan, sebagai berikut :

#### **1. Realisasi Kinerja Sasaran Utama Tahun 2023**

Adapun capaian Realisasi Indikator Kinerja Tujuan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat diuraikan pada sebagai berikut:

- a. Tujuan “ Meningkatkan Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas, dengan indikator ‘Persentase Permukiman Layak Huni, terdapat realisasi sebesar 99,11% dari target 99,32% atau capaian sebesar 99,79% dengan kriteria” Sangat Tinggi”.**
- b. Sasaran I “ Meningkatkan cakupan rumah layak huni”, dengan Indikator “Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni”, dengan realisasi sebesar 99,83 dari target 99,83 sehingga capaian sebesar 100% dengan kriteria”Sangat Tinggi”.**
- c. Sasaran II “ Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai” dengan Indikator “Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU”, terdapat realisasi sebesar 12,18% dari target 14,5% atau capaian sebesar 84% dengan kriteria “ Tinggi”.**
- d. Sasaran III” Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh” dengan Indikator ‘Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh, terdapat realisasi sebesar 36.80% dari target 51,47% atau capaian sebesar 71,49% dengan kriteria “ Tinggi”.**
- e. Sasaran IV ‘Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”, dengan realisasi sebesar 72,55 dari target 75 sehingga capaian sebesar 96,75%, dengan kriteria ”Sangat Tinggi”.**

**2. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023**

**Tabel 4.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Program dan Kegiatan**

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota</b>	-
<b>1</b>	<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Rumah yang telah dilakukan Pendataan dan Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota</b>	<b>100</b>
	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	100
<b>2</b>	<b>Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Masyarakat yang bersedia di Relokasi akibat Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah</b>	<b>0%</b>
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/ Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota	-
	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	100
<b>3</b>	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	-

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang ter rehabilitasi	0.00
	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bag iRumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.00
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	0.00
<b>4</b>	<b>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>	<b>Persentase hunian Rusun milik pemerintah Kota yang terkelola</b>	<b>89.89</b>
	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/ Penghuni Rumah Susun	100.00
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/ atau Rumah Khusus	100.00
<b>5</b>	<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</b>	<b>Persentase Perumahan yang sesuai rencana tapak</b>	<b>114.69</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100.00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan umum/rumah susun umum	100.00



No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)
6	<b>Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)</b>	<b>Jumlah Rekomendasi Teknis Sarusun yang diterbitkan</b>	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	100.00
2	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	Persentase peningkatan PSU pada lingkungan perumahan	100,00
1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Luasan PSU yang dibangun dan dipelihara	100,00
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan yang disusun	100,00
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah penyediaan PSU melalui penerbitan rekomendasi siteplan perumahan	30,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Rapat Koordinasi Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	100,00
3	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>Luasan Kawasan Kumuh</b>	<b>130.23</b>
1	<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>Jumlah Luasan (ha) Penanganan infrastruktur Kawasan Kumuh</b>	<b>71.50</b>
	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Lokasi Perumahan dan permukiman Kumuh	100.00

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)
	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	100.00
	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Pemukiman Kumuh	100.00
<b>2</b>	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani</b>	<b>100.00</b>
	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (site plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh	100.00
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak yang Diperbaiki	100.00
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/ Dipugar Kumuh	100.00
	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	100.00
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>IKM Internal Perangkat Daerah</b>	<b>96.73</b>
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>103.19</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	126.92

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)
<b>2</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>104.72</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	125.00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	200.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	452.50
<b>3</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>76.39</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	416.67
<b>4</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100.01</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100.00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100.00

### 3. Realisasi Keuangan Tahun 2023

Tabel 4.2

**Realisasi Anggaran Belanja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota  
Balikpapan Kota Balikpapan  
Tahun 2023**

PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN	REALISASI	%
23.171.999.815	28.023.816.668,00	23.870.222.903,00	85.18

Pada APBD tahun 2023, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Kota Balikpapan melaksanakan 4 (empat) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan dengan pagu murni sebesar **Rp. 23.171.999.815 menjadi** melaksanakan 4 (empat) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) dengan pagu sebesar **Rp. 28.023.816.668,00** pada mekanisme perubahan. Adapun realisasi anggaran tahun 2023 sebesar 85.18%.

### 4. Faktor-Faktor Penghambat, Pendorong dan Tindak Lanjut Capaian Kinerja Tahun 2023

#### 1. Sasaran I “Meningkatnya cakupan rumah layak huni”

Adapun faktor-faktor keberhasilan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Kerjasama dengan seluruh pihak terkait.
- b. Adanya data perumahan yang telah update.
- c. Terdapat aplikasi simrusun untuk pengelolaan retribusi sewa rusunawa.
- d. Adanya Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana.

- e. Adanya Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP.
- f. Tersusunnya Dokumen Naskah Akademik dan Perwali Petunjuk Teknis RP3KP.
- g. Adanya supervisi peningkatan kualitas gedung rusunawa
- h. Adanya penatausahaan pemanfaatan rusunawa.
- i. Adanya Sosialisasi Sertifikasi Pengembang Pengembangan Perumahan.
- j. Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum

Adapun faktor-faktor penghambat pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Belum terdapat proses bisnis, Review SOP dan standar pelayanan untuk penanganan bencana.
- b. Belum adanya peraturan internal terkait penanganan SPM urusan Bidang perumahan.
- c. Belum dibangunnya sistem informasi data perumahan dan permukiman terintegrasi.
- d. Belum optimalnya integrasi antara penyediaan perumahan dan sarana prasarananya
- e. Pemanfaatan lahan untuk perumahan yang belum efektif
- f. Masih adanya *backlog* kepemilikan rumah;
- g. Masih adanya rumah yang berada pada rawan risiko bencana

Adapun tindak lanjut untuk mengatasi ketidaktercapaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Keandalan dan kelayakan yang dibangun secara swadaya perlu memperhatikan risiko bencana,

- b. Memberikan kemudahan fasilitasi perizinan dalam proses penyediaan perumahan
- c. Penyediaan lahan dan pembiayaan untuk sarana dan prasarana dasar dan perumahan MBR melalui penyediaan Rusunawa.
- d. Meningkatkan kualitas layanan rusunawa
- e. Revisi peraturan terkait pengelolaan rusunawa
- f. Meningkatkan Kerjasama dengan pihak perbankan terkait pembiayaan sewa retribusi rusunawa yang menjadi pendapatan Pemerintah Kota Balikpapan..
- g. Mengembangkan aplikasi SIMRUSUN bersama Diskominfo

## 2. Sasaran II “Berkurangnya luas kawasan kumuh”

Faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan serta tindak lanjutnya, diantaranya sebagai berikut:

Faktor-faktor keberhasilan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Kerjasama dengan seluruh pihak terkait
- b. Adanya data permukiman yang telah update
- c. Adanya Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) Kota Balikpapan

Faktor-faktor penghambat pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Belum terdapat penyusunan proses bisnis, review SOP dan satandar pelayanan penanganan Kawasan kumuh.
- b. Belum dibangunnya sistem informasi data perumahan dan permukiman Terintegrasi.
- c. Pencegahan dan penanganan permukiman kumuh belum dilakukan secara terpadu.

- d. Belum optimalnya kolaborasi antar dinas terkait (Bappedalitbang, Dinas PU, BPBD, DPPR, dan DLH) dalam penanganan kumuh )
- e. Terdapat permukiman kumuh di atas 10 Ha-15Ha yang belum diintervensi Pemerintah Provinsi dan di atas 15 Ha yang belum diintervensi Pemerintah Pusat
- f. Adanya perpindahan penduduk dari daerah lain ke Kota Balikpapan akibat perpindahan Ibu Kota Negara menimbulkan potensi permukiman kumuh baru.
- g. belum optimalnya ketersediaan rumah layak huni serta rendahnya ketersediaan utilitas pemukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- h. Masih adanya permukiman illegal.
- i. Masih terdapat sarana dan prasarana permukiman yang belum terpenuhi.
- j. proses pengadaan barang dan jasa untuk penanganan rumah tidak layak huni yang memerlukan waktu relatif lama
- k. Penyusunan Dokumen Peraturan Wali Kota Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKPK) Kota Balikpapan

Adapun tindak lanjut untuk mengatasi ketidaktercapaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Penanganan permukiman kumuh kota secara inklusif
- b. perlunya memastikan ketersediaan pasokan material sesuai dengan waktunya dan melakukan pemetaan terhadap material yang dapat disubstitusi apabila terdapat kendala dalam penanganan RTLH.
- c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk penanganan kumuh kota.
- d. Update data perumahan dan kawasan permukiman secara periodik.

### **3. Sasaran III “Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai”**

Faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan, diantaranya sebagai berikut:

Adapun faktor-faktor keberhasilan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Kerjasama dengan seluruh pihak terkait.
- b. Adanya data PSU Perumahan yang telah update
- c. Adanya verifikasi PSU Perumahan yang dilaksanakan tim verifikasi PSU.

Adapun faktor-faktor penghambat pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Belum terdapat penyusunan proses bisnis, review SOP dan standar pelayanan terkait pengelolaan dan pemeliharaan PSU Perumahan.
- b. Belum dibangunnya system informasi data perumahan dan permukiman terintegrasi.
- c. Masih adanya PSU Perumahan yang belum diserahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan.
- d. Sarana dan prasarana pemeliharaan PSU Perumahan yang belum memadai.

Adapun tindak lanjut untuk mengatasi ketidaktercapaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi secara intensif kepada pihak terkait untuk penanganan PSU Perumahan.
- b. Monitoring dan update data PSU Perumahan.
- c. Sosialisasi terkait peraturan tata cara penyerahan PSU .



#### **4. Sasaran IV “Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan, diantaranya sebagai berikut:

Adapun faktor-faktor keberhasilan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Kerjasama dengan seluruh pihak terkait
- b. Adanya update data pertriwulan yang telah update

Adapun faktor-faktor penghambat pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Belum terdapat penyusunan proses bisnis, SOP dan proses pengumpulan data, pengolahan data, pelaporan dan dan evalausi data kinerja.
- b. Belum dibangunnya system aplikasi kinerja dan data keuangan yang terintegrasi.

Adapun tindak lanjut untuk mengatasi ketidaktercapaian kinerja adalah sebagai berikut:



- a. Meningkatkan koordinasi internal secara intensif terkait monitoring dan evaluasi capaian kinerja masing-masing bidang.
- b. Meningkatkan koordinasi ke Bappeda Litbang, Bagian Organisasi dan Inspektorat secara intensif terkait monitoring dan evaluasi capaian kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.
- c. Melakukan inovasi untuk mendukung capaian kinerja
- d. Metode pengumpulan data secara efektif dan efisien

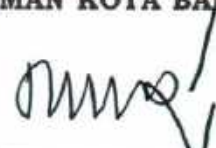
Berbagai pencapaian target sasaran-sasaran kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan memberikan gambaran

bahwa keberhasilan dan kegagalan kinerja sangat ditentukan oleh komitmen, kerjasama, keterlibatan dan dukungan aktif semua pegawai dan instansi yang terkait. Semoga Laporan kinerja (LKJIP) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Kota Balikpapan Tahun 2023 dapat digunakan sebagai evaluasi dan analisa pencapaian tujuan, saasaran, program dan kegiatan dalam peningkatan kualitas kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan selanjutnya.

Balikpapan, 28 Februari 2024

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN  
PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN**

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Ambo Dai	Sekretaris	
2	Asih M	Kasubag. Program dan Keuangan	



**RAFIUDDIN, ST. MT**

REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

KOTA BALIKPAPAN

SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	1. Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	99,83%	99,83%	100%	Manindaklanjuti hasil pendataan rumah yang terdampak pada tahun 2022 terdapat 74 unit yang terverifikasi untuk dilakukan penangunan pada tahun mendatang dari 225 unit rumah terdata dengan Pendataan By Name By Address (BNBA) yang valid yang rencana dilaksanakan di tahun 2023 namun tidak terlaksana karena belum terdapat SK Penetapan Bencana. Pada tahun 2023 tidak terdapat pemberian bantuan layak huni bagi korban bencana dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program karena tidak terdapat bencana. Pada tahun 2023 telah dilaksanakan bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni bersumber dari dana APBD Tahun 2023 Kota Balikpapan sebanyak 100 unit rumah penerima bantuan untuk perbaikan/peningkatan kualitas berupa bantuan sosial barang seperti Material/Bahan Bangunan sebagai stimulan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menerima bantuan untuk berwujud secara berkelompok gotong royong melaksanakan perbaikan masing-masing rumah secara bergantian.
2.	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai	2. Persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	14,50%	12,18%	84,0%	Target kinerja sasaran Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai Tahun 2023 adalah sebesar 12,18% dengan capaian sebesar 83,98%, terdapat 40.755 unit rumah dalam perumahan yang telah dibangun namun baru 4963 yang telah diserahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan. Tumbuhnya perumahan di Kota Balikpapan di dukung oleh peningkatan iklim investasi di kota Balikpapan sebagai pendukung Ibu Kota Negara (IKN) yang berpengaruh terhadap bertumbuhnya sektor perumahan dan mengakibatkan peningkatan yang signifikan terhadap rumah yang terfasilitasi PSU. Laju pertumbuhan penduduk memicu backlog perumahan di kota besar termasuk di Balikpapan sehingga dibutuhkan hunian untuk masyarakat dan pegawai yang cukup banyak. Sektor perumahan merupakan sektor yang bertumbuh positif karena memiliki efek berganda multiplier effect yang dapat menghidupkan 174 sub sektor industri lain seperti pabrik material bahan bangunan, transportasi, lembaga pembiayaan seperti Bank, Koperasi, financial, teknologi, dan perdagangan. Bertumbuhnya sektor perumahan selain karena peningkatan iklim investasi sebagai dukungan terhadap IKN di Kalimantan Timur, juga didukung oleh adanya program sejuta rumah Kementerian PUPR yang menjadikan terfasilitasinya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk dapat memiliki rumah yang terfasilitasi PSU dengan baik. Peningkatan rumah yang terfasilitasi PSU tidak serta merta lepas dari pengawasan Disperkim Kota Balikpapan dalam pemenuhan kualitas dan kewajiban PSU. Ketercapaian target kinerja ini tetap memerlukan konsistensi dan komitmen antara pengembang perumahan dan Disperkim sebagai leading sector bidang perumahan rakyat untuk mendukung ketersediaan PSU perumahan yang memadai. Hal ini ditandai oleh komitmen pimpinan Disperkim dengan terus dilakukannya pengawasan dan pengendalian serta evaluasi penyedia perumahan dalam penyediaan PSU yang memadai.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	Mengurangi Luas kawasan kumuh	3. Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	51.47%	36.82%	71.54%	Target kinerja pengurangan luas kawasan kumuh pada Tahun 2023 adalah sebesar 3,99 Ha. Target Penanganan kumuh tersebut ditangani oleh penanganan melalui dana APBD Kota untuk luas kumuh dibawah 10 Ha namun tidak terdapat intervensi dari Pemerintah Pusat melalui Kotaku untuk luas kumuh diatas 15 Ha dan Pemerintah Provinsi untuk luas kumuh 10 Ha- 15 Ha . Pada akhir tahun 2022 telah tertangani 52,42 Ha kawasan kumuh dengan penangan oleh Kotaku seluas 51,01 Ha dan penanganan melalui APBD Kota Balikpapan seluas 1,41 Ha di RT. 4 Kelurahan Damai , Kecamatan Balikpapan Kota sehingga total capaian penanganan kumuh sebesar 56,44 Ha
4.	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Diaperkim	4. Nilai Reformasi Birokrasi Diaperkim	75	72.55	96.73%	Nilai Perencanaan Kinerja= 23,77; Nilai Pengukuran Kinerja= 21,69; Nilai Pelaporan Kinerja= 10,39; Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal= 16,71 (terdapat perubahan indikator kinerja sasaran dengan Surat Sekretaris Daerah Nomor 060.4/01799/Org tanggal 22 Desember 2023 Perihal Penyusunan Pejanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023)

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN %	KET
1. Program Pengembangan Perumahan	Rp7,904,563,500	Rp6,116,719,568	77.38%	APBD P
2. Program Kawasan Permukiman	Rp4,165,648,800	Rp3,981,926,232	95.59%	APBD P
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Rp4,954,855,500	Rp4,692,025,137	94.70%	APBD P
4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp10,998,758,868	Rp9,079,551,966	82.55%	APBD P



Lampiran Bukti Dukung Kegiatan Tahun 2023

**KOLABORASI DAN SINERGI PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023**



SOSIALISASI PEMBINAAN KELOMPOK PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN (KPP)



Rapat Kerja Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Balikpapan



Rapat Kerja dengan Pemangku Kepentingan pada Sektor Perumahan



Hapernas Tahun 2023

**KOLABORASI DAN SINERGI PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023**



Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Dari Balai P2P Kalimantan II Satker Penyediaan Perumahan



Koordinasi dengan Asosiasi Pengembang Perumahan (REI, APERSI, HIPERA)



Kunjungan Kerja KemenPUP R (Peminjauan Lokasi PSU 2008-2011



Survey dan pemetaan lapangan perumahan kawasan kumuh kewenangan Provinsi di Kelurahan Klantanan 10 bersama BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur

## CAPAIAN KINERJA KEGIATAN BIDANG PERUMAHAN



## KEGIATAN PENINJAUAN LAPANGAN



Kegiatan Peninjauan Lapangan  
Pembangunan Perumahan Regency



Kegiatan Pra-survey  
Perumahan The Peak  
Residence dan Perumahan  
Town Hills



Peninjauan sarana bendali  
perumahan-perumahan di  
Kawasan Timur Balikpapan

## KEGIATAN PEMELIHARAAN GEDUNG RUSUNAWA



Pemeriksaan lapangan kualitas bendali perumahan Lambada Green, Graha Mulawarman, Pondok Asri, Borneo Paradiso The Green Azarya



Peninjauan Lapangan Perumahan Wahana Asri 2 Terkait GSB Dan PSU

Peninjauan kesesuaian site plan perumahan village



## SOSIALISASI BANTUAN STIMULAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (BSPKRTLH)



Kegiatan sosialisasi Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (BSPKRTLH) kepada Penerima Bantuan di Aula Kecamatan Balikpapan Kota.



Kegiatan Sosialisasi Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (BSPKRTLH) kepada Penerima Bantuan di Aula Kelurahan Baru Ilir

NO BNBA : 003  
NO KTP : 6471026707560001  
NAMA PB : MASNAH  
ALAMAT : JL. ASKIT NO. 17 RT. 13  
KELURAHAN : BARU ILIR  
KECAMATAN : BALIKPAPAN BARAT  
KOTA : BALIKPAPAN  
JENIS KEGIATAN : BSPKRTLH



SEBELUM



SESUDAH



**REALISASI BSPKRTLH TAHUN 2023**

NO BNBA : 002  
NO KTP : 6471021804590003  
NAMA PB : SUJIRAN  
ALAMAT : JL. AL FALAH NO. 12 RT. 031  
KELURAHAN : BARU ILIR  
KECAMATAN : BALIKPAPAN BARAT  
KOTA : BALIKPAPAN  
JENIS KEGIATAN : BSPKRTLH



SEBELUM



SESUDAH

NO BNBA : 004  
NO KTP : 6471022206550001  
NAMA PB : TUKIRAN  
ALAMAT : JL. GANG SAMPURNA NO. 38 RT. 10  
KELURAHAN : BARU ILIR  
KECAMATAN : BALIKPAPAN BARAT  
KOTA : BALIKPAPAN  
JENIS KEGIATAN : BSPKRTLH



SEBELUM



SESUDAH

NO BNBA : 067  
NO KTP : 6471052009580002  
NAMA PB : ABDUL MADJID  
ALAMAT : JL. GANG SAMPURNA NO. 38 RT. 10  
KELURAHAN : KLANDASAN ILIR  
KECAMATAN : BALIKPAPAN KOTA  
KOTA : BALIKPAPAN  
JENIS KEGIATAN : BSPKRTLH



SEBELUM



SESUDAH

NO BNBA : 077  
NO KTP : 6471031701890002  
NAMA PB : TUKIRAN  
ALAMAT : Jl. Tepo KM.10 RT.05  
KELURAHAN : KARANG JOANG  
KECAMATAN : BALIKPAPAN UTARA  
KOTA : BALIKPAPAN  
JENIS KEGIATAN : BSPKRTLH



SEBELUM



SESUDAH

NO BNBA : 083  
NO KTP : 6471033112720018  
NAMA PB : ALIANSYAH  
ALAMAT : JL TEPO RT 007  
KELURAHAN : KARANG JOANG  
KECAMATAN : BALIKPAPAN UTARA  
KOTA : BALIKPAPAN  
JENIS KEGIATAN : BSPKRTLH



SEBELUM

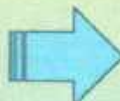


SESUDAH

NO BNBA : 086  
NO KTP : 6471033112590044  
NAMA PB : KAHAR  
ALAMAT : JL BATU RATNA KM 11 RT 014  
KELURAHAN : KARANG JOANG  
KECAMATAN : BALIKPAPAN UTARA  
KOTA : BALIKPAPAN  
JENIS KEGIATAN : BSPKRTLH



SEBELUM

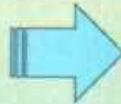


SESUDAH

NO BNBA : 087  
NO KTP : 6471030905750001  
NAMA PB : MUSTAKIM  
ALAMAT : JL. GIRI REJO NO. 21 RT 28  
KELURAHAN : KARANG JOANG  
KECAMATAN : BALIKPAPAN UTARA  
KOTA : BALIKPAPAN  
JENIS KEGIATAN : BSPKRTLH



SEBELUM

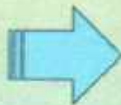


SESUDAH

NO BNBA : 097  
NO KTP : 6471051511650006  
NAMA PB : JASMAN  
ALAMAT : JL. MARSMA R. ISWAHYUDI RT. 009  
KELURAHAN : SUNGAI NANGKA  
KECAMATAN : BALIKPAPAN SELATAN  
KOTA : BALIKPAPAN  
JENIS KEGIATAN : BSPKRTLH



SEBELUM

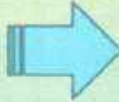


SESUDAH

NO BNBA : 098  
NO KTP : 6471051010470004  
NAMA PB : MUHAMMAD SAPRI  
ALAMAT : JL. MARSMAR. ISWAHYUDI RT. 009  
KELURAHAN : SUNGAI NANGKA  
KECAMATAN : BALIKPAPAN SELATAN  
KOTA : BALIKPAPAN  
JENIS KEGIATAN : BSPKRTLH



SEBELUM



SESUDAH

## MONITORING PEKERJAAN PERMUKIMAN KUMUH DAN BSPKRTLH

Monitoring pekerjaan penanganan sistem sanitasi permukiman kumuh di Kelurahan Damai.



Monitoring pengiriman bahan material dan pengangkutan pemasangan material Rumah Teratai Bantuan Stimulus Perbaikan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Karang Jaring.



Survei dan persiapan lapangan penanganan kawasan kumuh kewenangan Provinsi di Kelurahan Klambayan Iri bersama BAPPEDA Provinsi Kalimantan Tengah.

